



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 30 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan Anggaran Tahun 2013 dengan keadaan terkini dan agar tercapai pelaksanaan pembangunan yang optimal, maka perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2010 -2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN (RKPD-P) KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2013.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.

11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2011-2015.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pemerintah daerah dibidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Karawang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 2

- (1) RKPD Perubahan merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 bahwa dalam rangka merealisasikan mengimplementasikan visi, misi, strategi dan prioritas pembangunan, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Umum Tahun 2010, maka RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2011 diadakan perubahan dan penyempurnaan.
- (3) RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 adalah tahapan ke dua dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025.
- (4) RKPD Perubahan sebagai landasan dalam menetapkan kebijakan dan program tahun pertama, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dipilah menurut sumber dari APBD Kabupaten Karawang, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN serta dukungan partisipasi masyarakat.
- (5) RKPD Perubahan Tahun 2013 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2013
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH PADA APBD-P TAHUN 2013
BAB VI : PENUTUP

- (4) Uraian secara rinci RKPD Perubahan Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2013 adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun KUA dan PPAS serta dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2013;
- b. sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2013.

BAB IV MASA BERLAKU

Pasal 4

RKPD Perubahan Tahun 2013 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang dimulai pada tanggal 30 September 2013 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2013 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **04 September 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **04 September 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN : 2013 NOMOR : 30 .

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Karawang tahun 2013 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri secara demokrasi, transparansi dan akuntabel dengan pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan aspirasi dari bawah (*bottom-up*) maupun perencanaan dari tingkat atas (*top-down*).

RKPD merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Bappeda sebagai koordinator perencanaan pembangunan di daerah menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJMD dan selanjutnya mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rancangan RKPD memuat isu umum dan isu khusus yang ditarik menjadi isu strategis menjadi bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan setiap tahunnya, sampai dengan penyusunan Rancangan Akhir RKPD untuk kemudian ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RAPBD akan menjadi landasan penyusunan APBD yang ditetapkan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah.

Dalam mengikuti dinamika pembangunan dan kondisi terkini perlu penyesuaian perencanaan pembangunan. Terkait hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah , maka perlu

dilakukan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2013. Dimana Penyusunan Perubahan RKPD 2013 sangat terkait dengan visi, misi Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati periode Tahun 2010-2015 untuk kurun waktu lima tahun mendatang yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program-program dan kegiatan pembangunan yang terukur disertai pagu indikatif dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian kedudukan Perubahan RKPD Tahun 2013 merupakan:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dalam rangka menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun 2013.
2. Acuan bagi seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Instrumen untuk menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

Dokumen RKPD ini merupakan dokumen publik, sehingga keterlibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi suatu keharusan. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen RKPD ini harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam kapasitas untuk pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (SISRENBANGDA);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2010 -2015.

1.3. Hubungan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Untuk memberikan fokus pada pembangunan daerah tahun 2013, diperlukan adanya daya dorong (driving forces) dalam rangka peningkatan fokus pembangunan dan dibutuhkan sinergitas lintas SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang, baik Pemerintah

Kabupaten, Pemerintah Kecamatan sampai pada Pemerintah Desa/Kelurahan serta sinergitas antarpelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat tersebut merupakan komitmen program dan kegiatan yang disepakati untuk dikerjakan melalui model pendekatan sinergitas SKPD dengan penggalangan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Karawang yang relevan.

Guna mewujudkan aspek keberlanjutan serta sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2013 turut memperhatikan pula Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013 yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas didukung Pemantapan Tata Kelola Sinergi Pusat dan Daerah”, yang dijabarkan kedalam 11 prioritas pembangunan nasional meliputi (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan hidup dan bencana; (10) Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian visi nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang: politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan rakyat.

Disamping itu prioritas pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2013 memperhatikan pula Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2013 yaitu “Mengintegrasikan Peran Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas dalam mewujudkan Pembangunan Sektoral dan Perkuatan Pembangunan Kewilayahan untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera, dengan prioritas pembangunan Jawa Barat melalui rumusan 10 common goals Pembangunan yaitu (1) Peningkatan kualitas pendidikan; (2) Peningkatkan Kualitas Kesehatan; (3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat; (4) Kemandirian Pangan; (5) Peningkatan Kinerja Aparatur; (6) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (7) Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku; (8) Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan

Hidup; (9) Pembangunan Perdesaan; (10) Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata.

Dalam rangka percepatan pembangunan di Propinsi Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat menetapkan 40 (empat puluh) kegiatan Tematik di Jawa Barat dalam RKPD Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 yang disinkronkan dengan RKPD Kabupaten/Kota di Jawa Barat guna mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan, secara merata, berkualitas, dan berkeadilan, melalui pemihakan kepada rakyat miskin (*pro-poor*) dan, di sisi lain berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*pro-growth*) dan berkelanjutan, melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat (*pro-job*).

Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi nyata di Kabupaten Karawang untuk menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, dengan memperhatikan pula kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2013, agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta dapat menanggulangi permasalahan mendasar daerah terutama kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Prioritas pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2013 disusun berdasarkan Tema yang telah dirumuskan yaitu **“MENINGKATKAN SINERGITAS PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENGUATAN PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN KARAWANG 2011-2015”**

Tema tersebut difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menggerakkan perekonomian ditingkat desa/kelurahan, dimana seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013 oleh semua Organisasi Perangkat Daerah, secara langsung maupun tidak langsung, diarahkan sebagai langkah nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi Kabupaten Karawang tahun 2011-2015.

Dalam upaya mewujudkan tema pembangunan tahun 2013 tersebut, dirumuskan ke dalam 5 Prioritas Pembangunan yaitu Prioritas Pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2013 yang tetap difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui :

1. Peningkatan Kesejahteraan sosial melalui upaya Peningkatan kualitas Pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta perwujudan kehidupan sosial yang religious dan harmonis.
2. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industri, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata.
3. Peningkatan sarana prasarana dasar, infrastruktur dan pembangunan perdesaan.
4. Optimalisasi pengelolaan potensi sumberdaya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tata ruang.
5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.

1.4. Sistematika dokumen RKPD

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Perubahan RKPD yang menjelaskan pengertian ringkas Perubahan RKPD dan proses penyusunan Perubahan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta kaitannya dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD serta sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD.

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Menjelaskan terkait gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Karawang, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Menjelaskan prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan. Bab ini berisi uraian mengenai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berisi tema pembangunan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berisikan uraian tentang program-program yang memerlukan prioritas berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam dokumen RPJMD.

BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Berisikan penjelasan rincian program dan kegiatan pokok Perubahan RKPD tahun 2013 yang dikaitkan dengan sasaran-sasaran strategis dalam RPJMD.

BAB VI Penutup

Merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan Perubahan RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2013 ini dimaksudkan:

1. Memberikan arahan bagi para penyelenggara pemerintahan, para pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Karawang dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dan menyusun rencana, program serta kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan yang komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah) dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan daerah.
2. Sebagai penjabaran jangka pendek dari tujuan – tujuan strategis pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut berupa kebijakan dan program yang dipilih sebagai suatu strategi dalam pencapaian sasaran disertai target kinerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Adapun tujuannya adalah :

1. Untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik antar sektor pembangunan, antar tingkat Pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;
2. Menyelaraskan skala prioritas program pembangunan daerah Kabupaten Karawang;
3. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
4. Untuk menyediakan suatu tolok ukur kinerja dan merupakan instrumen dalam pengukuran dan evaluasi kinerja program pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama periode berjalan maupun pada saat pertanggungjawaban kepala daerah.

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107°02' - 107°40' BT dan 5°56'2" - 6°34' LS. Kabupaten Karawang termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi kemiringan wilayah 0 - 2%, 2 - 15% dan diatas 40%.

Secara administratif, Kabupaten Karawang mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Batas Alam yaitu Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kab. Bogor dan Kabupaten Cianjur
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 km² atau 3,73% dari luas Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang juga memiliki wilayah pesisir dan laut, yaitu sepanjang 75 km di pantai utara dengan wilayah kewenangan 4 (empat) mil laut dari garis pantai terluar.

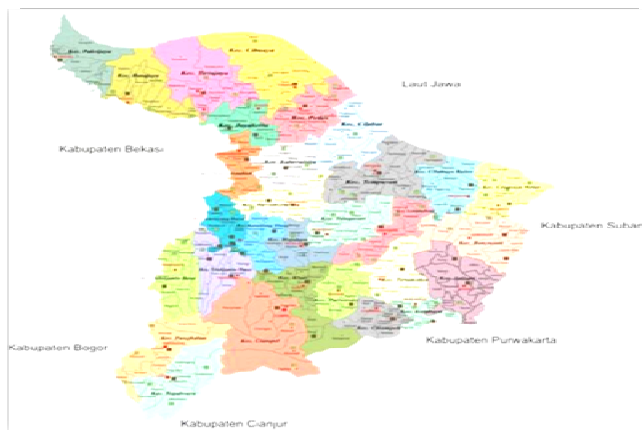
Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 kecamatan, 297 desa dan 12 kelurahan. Penamaan Kecamatan baru menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2004 yaitu tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan, yaitu:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Pangkalan | 16. Kecamatan Telagasari |
| 2. Kecamatan Tegalwaru | 17. Kecamatan Majalaya |
| 3. Kecamatan Ciampel | 18. Kecamatan Karawang Timur |
| 4. Kecamatan Telukjambe Timur | 19. Kecamatan Karawang Barat |
| 5. Kecamatan Telukjambe Barat | 20. Kecamatan Rawamerta |
| 6. Kecamatan Klari | 21. Kecamatan Tempuran |

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 7. Kecamatan Cikampek | 22. Kecamatan Kutawaluya |
| 8. Kecamatan Purwasari | 23. Kecamatan Rengasdengklok |
| 9. Kecamatan Tirtamulya | 24. Kecamatan Jayakarta |
| 10. Kecamatan Jatisari | 25. Kecamatan Pedes |
| 11. Kecamatan Banyusari | 26. Kecamatan Cilebar |
| 12. Kecamatan Kotabaru | 27. Kecamatan Cibuaya |
| 13. Kecamatan Cimalaya Wetan | 28. Kecamatan Tirtajaya |
| 14. Kecamatan Cilamaya Kulon | 29. Kecamatan Batujaya |
| 15. Kecamatan Lemahabang | 30. Kecamatan Pakisjaya |

Gambar 2.1

Kabupaten Karawang sebagai Lingkup Wilayah Perencanaan



Pada Tahun 2012, Jumlah penduduk Kabupaten Karawang sampai dengan Bulan Desember berjumlah 2.207.181 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,80* % dengan komposisi penduduk sebagai berikut:

1) Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin

Komposisi penduduk Kabupaten Karawang menurut jenis kelamin pada tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.137.818 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.069.363 jiwa. Dengan demikian berdasarkan rasio jenis kelamin sebesar 106,4*%, artinya setiap 100 orang perempuan berbanding dengan 106 orang laki-laki.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun
2007-2011

No.	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Penduduk	2.051.303	2.082.143	2.127.791	2.165.996	2.207.181
2.	Komposisi menurut jenis kelamin :					
	Pria	1.039.084	1.066.648	1.096.892	1.116.586	1.137.818
	Wanita	1.012.219	1.015.495	1.030.899	1.049.410	1.069.363
3.	Pertumbuhan (LPP %)	1,79	1,50	1,76	1,80	1,80
4.	Tingkat Kepadatan (%)	11,95	12,17	-	-	1,28

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka sangat sementara

2) Komposisi penduduk berdasarkan struktur usia

Komposisi penduduk Kabupaten Karawang berdasarkan usia pada tahun 2011 sangat bervariasi dimana penduduk berusia 5 – 9 tahun berjumlah 206.452* jiwa atau sekitar 9,53 %* dan 10 – 14 tahun berjumlah 204.979* jiwa atau sekitar 9,46%*. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk terbanyak berada pada usia sekolah dasar.

Jumlah penduduk usia produktif atau usia 15 – 64 tahun berjumlah 1.456.369* jiwa atau sekitar 67,24%*. Berdasarkan komposisi penduduk juga dapat dilihat angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara penduduk usia non produktif dengan penduduk usia produktif. Pada tahun 2011 nilai *dependency ratio* menunjukkan angka 48,73% yang berarti bahwa dari 100 orang usia produktif menanggung beban sekitar 49* orang yang tidak produktif. Jika dibandingkan dengan angka *dependency ratio* pada tahun 2010 sebesar 48,7 % (100 orang menanggung beban sekitar 49 orang), sehingga memperlihatkan perubahan tingkat beban ketergantungan yang semakin baik (*=angka sementara).

Tabel 2.2
Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut
Struktur Usia Tahun 2007-2011

No.	Struktur Usia	2007	2008	2009	2010	2011*
1.	5 – 9	183.704	191.394	182.654	202.586	206.452
2.	10 – 14	183.140	175.302	202.492	200.402	204.979
3.	15 – 64	1.366.473	1.397.654	1.446.206	1.428.545	1.456.369
4.	Angka Beban Ketergantungan (<i>Dependency Ratio %</i>)	50,4	49	47,53	48,7	48,73

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sangat sementara

3) Komposisi penduduk berdasarkan lapangan usaha

Pada tahun 2011 jumlah penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha sebanyak 880.087* orang. Dari jumlah tersebut, sebesar 174.520* orang atau sekitar 19,83%* bekerja pada lapangan usaha pertanian dan perikanan. Pada lapangan usaha perdagangan memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 291.092* orang atau sekitar 33,07%*. Sedangkan pada lapangan usaha industri menyerap tenaga kerja sebesar 186.203* orang atau sekitar 21,16%. (*=angka sementara).

Tabel 2.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2007-2011

No.	Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	2011*
1.	Pertanian dan Perikanan	245.642	259.579	261.770	244.480	174.520
2.	Perdagangan	164.875	178.089	235.592	196.037	291.092
3.	Industri	154.331	160.577	177.514	208.781	186.203
4.	Seluruh Lapangan Usaha	761.164	795.070	896.640	861.711	880.087

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sangat sementara

Tabel 2.4
Komposisi dan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja
Berumur 10 Tahun Ke Atas di Kabupaten Karawang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011

Lapangan Usaha	2010		2011*	
	Jml Naker	%	Jml Naker	%
1. Pertanian	244.480	28,37	174.520	19,83
2. Pertambangan dan Penggalian	2.557	0,30	-	-
3. Industri Pengolahan	208.781	24,23	186.203	21,16
4. Listrik, Gas & Air	3.482	0,40	-	-
5. Konstruksi	36.352	4,22	-	-
6. Perdagangan, Hotel, Restoran	196.037	22,75	291.092	33,08
7. Pengangkutan dan Komunikasi	51.289	5,95	-	-
8. Jasa – Jasa	106.797	12,39	107.983	12,27
9. Lainnya	11.936	1,39	120.289	13,67
TOTAL	861.711	100,00	880.087	100

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sangat sementara

4) Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Karawang salah satunya difokuskan pada sektor pendidikan, karena kondisi tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Karawang masih relatif rendah. Dilain pihak kualitas SDM masyarakat merupakan faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Karawang secara umum masih relatif rendah atau masih dalam taraf pendidikan sekolah dasar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, pada tahun 2011 jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang berpendidikan kurang atau setara SD berjumlah 1.075.044 orang, SMP sebanyak 311.440 orang, SMA sebanyak 315.295 orang dan Diploma sebanyak 52.781 orang.

Tabel 2.5
Komposisi Penduduk Kabupaten Karawang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007-2011

No.	Tingkat Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011*
1.	≤SD	1.179.863	1.129.281	1.178.930	1.053.679	1.075.044
2.	SLTP	269.551	281.146	287.902	305.005	311.440
3.	SLTA	212.677	221.718	251.088	309.484	315.295
4.	Diploma	42.154	19.888	42.228	51.790	52.781

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Tingkat fertilitas pada tahun 2010 sebesar 1.096, jika dilihat dari perbedaan panjang batang piramida kelompok umur 0-4 tahun yang lebih pendek dibandingkan kelompok umur 5-9 tahun, maka terindikasi selama kurun waktu lima tahun adanya penurunan tingkat fertilitas. Data lain juga memperlihatkan usia perkawinan pertama penduduk perempuan yang relatif semakin matang yaitu 21,46 tahun. Hal ini memperlihatkan kesadaran masyarakat akan program KB telah berjalan dengan baik. Pada tahun 2010 jumlah pasangan usia subur sebanyak 342.576 (naik 1,82 persen dibandingkan tahun 2009) dengan peserta KB baru sebanyak 45.661 orang (naik 41,44 persen). Terkait dengan partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak, terdapat 430 keluarga balita yang menjadi anggota Bina Keluarga Balita (BKB).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi (economy growth) adalah perkembangan kegiatan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Laju pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan perkapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan produktivitasnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga banyak digunakan sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya,

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator ekonomi untuk melihat seberapa besar kenaikan atau penurunan jumlah output yang dihasilkan oleh suatu perekonomian secara agregat. Pada awal tahun 1990, LPE Karawang selalu berada pada angka pertumbuhan yang stabil yang ditopang dengan LPE sektor industri yang mencapai angka di atas 10 persen setiap tahun. Namun pada masa krisis ekonomi tahun 1997, LPE berkontraksi hingga sebesar minus 19,6%. Bahkan LPE sektor industri yang pada tahun 1996 sempat mencapai 16,69%, pada tahun 1998 turun ke angka minus 23,32 persen. Pada tahun 2000, kondisi perekonomian pasca krisis relatif belum stabil, dimana angka LPE bergerak secara fluktuatif dengan kecenderungan berada pada kisaran angka 4,5 – 5,5 persen atau dapat dikatakan pertumbuhan pada laju yang minimal.

Memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2006-2009 yang berada pada kisaran 4-10% berada diatas LPE rata-rata Jawa Barat . Hal tersebut cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi. Tumpuan harapan pergerakan roda ekonomi yang realistis di Kabupaten Karawang, bukan lagi bersumber pada keunggulan sumber daya alam (gas dan minyak bumi) yang ada (*comparative advantage*) melainkan kemampuan untuk mengolah dan menghasilkan produk unggulan yang berkualitas (*comparative advantage*).

Berdasarkan komparasi data tabel PDRB tahun 2010, kontribusi terbesar disumbangkan oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sector pertanian. Struktur perekonomian tahun 2006 - 2010, masih tetap didominasi oleh sektor industri sebagai sektor yang memberikan *share* terbesar rata-rata 36 persen, sektor perdagangan hotel dan restoran berada diposisi kedua menggeser sektor pertanian dengan

kontribusi sebesar 28,21 persen, sedangkan sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi dengan kecenderungan yang semakin menurun yaitu sebesar 14 persen.

Inflasi Kabupaten Karawang tahun 2010 mencapai 7,73%. Hasil pengolahan indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Karawang tahun 2010 dengan menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa selama tahun 2010 (Januari s.d. Desember 2010) telah terjadi inflasi sebesar 7,73% atau terjadi kenaikan indeks dari 112,79 pada bulan Desember 2009 menjadi 121,51% pada Bulan Desember 2010. Faktor determinan inflasi di Kabupaten Karawang lebih disebabkan andil kenaikan kelompok bahan makanan karena dari sisi permintaan adalah meningkatnya konsumsi masyarakat sehubungan faktor musiman yaitu masa hari raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.

Pada sektor KUKM, penyaluran kredit relatif meningkat pada tahun 2005 – 2010 sebesar 25,72 persen. Selain itu, kredit perbankan lebih banyak disalurkan kepada UMKM untuk jumlah dibawah Rp. 50 juta, yang relatif kurang sensitif terhadap perubahan suku bunga antara 1-2%. Berdasarkan jenis penggunaannya, sebagian besar kredit lebih diserap untuk kegiatan konsumsi ketimbang disalurkan untuk kegiatan produktif (modal kerja dan investasi). Sampai dengan triwulan IV-2005, posisi kredit untuk kegiatan konsumsi mencapai Rp.1,429 triliun (62,37 persen), sedangkan kredit untuk kegiatan produktif hanya tercatat sebesar 862,37 Milyar (37,63 persen). Sedangkan menurut sektor ekonomi, penyerapan kredit terbesar oleh sektor jasa dan lain-lain 67,64 persen, sektor perdagangan 22,67 persen, sektor industri 5,8 persen dan sektor pertanian 3,76 persen.

Pada sektor ketenagakerjaan, data jumlah penduduk Kabupaten Karawang yang bekerja tahun 2010 berjumlah 861.711 jiwa, dengan jumlah pengangguran sebanyak 63.084 jiwa. Sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor industri pengolahan adalah tiga sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu masing-masing sebesar 26,30 persen, 25,68 persen dan 19,74 persen. Secara umum, kondisi

ketenagakerjaan di Karawang masih didominasi oleh sektor informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap, pekerja tidak dibayar) yaitu sekitar 55,37 persen, walaupun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Apabila dibandingkan dengan data tahun 2009, memperlihatkan adanya penurunan kondisi ketenagakerjaan dimana terjadi penurunan pengangguran dari sebesar 121.608 jiwa menjadi hanya 63.085 jiwa.

Pada tahun 2010 pengeluaran per kapita sebulan masyarakat sebesar Rp. 239.986,00 dengan alokasi sekitar 59,95% atau sebesar Rp. 96.111,00 untuk konsumsi kelompok makanan dan sekitar 40,05% digunakan untuk konsumsi kelompok non makanan. Walaupun demikian secara umum tingkat pendapatan masyarakat masih belum mencerminkan tingkat kesejahteraan sebab alokasi konsumsi untuk kelompok non makanan masih < 60% dari total pengeluaran atau dengan kalimat lain bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan sehari-hari.

Tahun 2011, PDRB Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 63.078.939,56 juta*, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 23.099.431,90 juta*. Mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2010 dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 57.046.690,09 juta dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 21.767.794, 32 juta.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

Tabel 2.6
Peranan PDRB Kab. Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2011 (juta rupiah/persen)

No.	Lapangan Usaha	2010*)	2011*)
1.	Primer (Pertanian dan Pertambangan)	6.654.439,80 (11,66)	7.020.679,64 (11,13)
2.	Sekunder (Industri, Listrik, Air dan Bangunan)	33.740.943,98 (59,15)	367.855.766,07 (58,43)
3.	Tersier (Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi dan Jasa)	16.651.306,30 (29,19)	19.202.493,84 (30,44)
	PDRB	57.046.690,30 (100,00)	62.078.939,56 (100,00)

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Kontribusi sektor primer atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 11,66 persen pada tahun 2010 menjadi 11,13 persen. Begitu juga dengan sektor sekunder, dari 59,15 persen di tahun 2010 menjadi 58,43 persen pada tahun 2011. Namun sektor tersier, mengalami peningkatan dari 29,19 persen pada tahun 2010, menjadi 30,44 persen pada tahun 2011. Kontribusi sektor tersier tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Karawang selain sebagai daerah berbasis industri juga telah mulai berkembang menuju ke arah daerah berbasis perdagangan dan jasa.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi.

Tabel 2.7
Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2010-2011
Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

No.	Lapangan Usaha	2010	2011*)
1.	Pertanian	8,37	8,10
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,29	3,03
3.	Industri Pengolahan	54,12	53,25
4.	Listrik dan Air Bersih	3,14	3,13
5.	Bangunan	1,88	2,05
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,36	21,45
7.	Angkutan dan Komunikasi	4,81	5,04
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,16	1,15
9.	Jasa-jasa	2,86	2,80
	PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka sementara

Analisis sektor menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan tetap merupakan sektor terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang, yaitu sebesar 54,12 persen pada tahun 2010 dan 53,25 persen pada tahun 2011. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan dan pertanian, yang masing-masing menyumbang sebesar 21,45 persen dan 8,10 persen. Sedangkan 3 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB 2011 adalah sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro ekonomi yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. Dengan memperhatikan LPE dan sektor-sektor yang membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam suatu perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tahun 2011 dengan memperhitungkan kontribusi sektor migas diperkirakan mencapai angka 6,12* % dengan tingkat inflasi sebesar 3,21* %. (*=angka sangat sementara).

Tabel 2.8
Angka Agregatif PDRB Kabupaten Karawang, PDRB
Perkapita, LPE Sektor Migas, Tingkat Inflasi Tahun 2007-2011

No.	Uraian	2007	2008*	2009**	2010**	2011**
1.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	36.131.054	42.445.653	48.283.356	57.046.690	63.078.939
2.	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp)	16.558.530	18.353.975	19.712.339	21.767.794	23.099.431
3.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	18.168.835	20.965.082	23.513.743	26.810.288	29.241.402
4.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Rp)	8.326.610	9.065.536	9.599.807	10.230.231	10.708.166
5.	LPE Migas (%)	6,36	10,84	7,40	10,43	6,12
6.	Inflasi (%)	6,06	12,49	2,05	7,73	3,21

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi

Besaran tingkat pertumbuhan ekonomi yang berada pada angka 6,12 persen tidak dibarengi dengan penurunan tingkat inflasi (IHK) yang berada pada 3,21 persen, hal tersebut disebabkan nilai tambah ekonomi yang terbentuk tidak seluruhnya dinikmati oleh kalangan pekerja (penduduk Kabupaten Karawang) melainkan ada porsi yang menjadi bagian pengusaha/pemilik modal (diantaranya surplus usaha, deviden dan sebagainya) yang sebagian besar merupakan orang asing. Tumpuan harapan pergerakan roda perekonomian yang realistis, bukan lagi bersumber pada keunggulan sumberdaya alam yang ada (*comparative advantage*) melainkan kemampuan untuk mengolah dan menghasilkan produk unggulan yang berkualitas (*competitive advantage*).

Bila dicermati secara lebih detil, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, semua sektor positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun terjadi krisis ekonomi global, perekonomian di Kabupaten Karawang dapat diandalkan

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2010-2011 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2010*)	2011*)
1.	Pertanian	2,97	2,27
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,58	0,82
3.	Industri Pengolahan	10,75	5,30
4.	Listrik dan Air Bersih	10,48	7,24
5.	Bangunan	9,8	11,18
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,71	9,81
7.	Angkutan dan Komunikasi	8,39	11,26
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,84	5,67
9.	Jasa-jasa	2,42	3,56
	PDRB DENGAN MIGAS	10,43	6,12
	PDRB TANPA MIGAS	10,95	6,44

Sumber : BPS Kabupaten Karawang *) Angka Sementara

LPE menurut sektor menunjukkan bahwa sektor angkutan dan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam urutan Sembilan sektor/lapangan usaha, yang diikuti oleh sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita (*percapita income*). Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kemakmuran di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto penduduk secara nominal, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata perkapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.165.996 jiwa pada tahun 2011, PDRB perkapita berlaku Kabupaten Karawang sebesar Rp. 29.241.402, hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 9,07 persen dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2010 yang berada pada nilai Rp. 26.810.288,00.

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Karawang secara umum, walaupun indeks daya beli menunjukkan peningkatan, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke bawah.

Tabel 2.10
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2007-2011

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB	Perubahan (%)	Pendapatan perkapita ADHK	Perubahan (%)
2007	18.168.835	16,80	8.326.610	7,79
2008	20.965.082	15,39	8.065.536	8,87
2009*)	23.513.743	12,16	9.599.807	5,89
2010**)	26.810.288	14,02	10.230.231	6,57
2011**)	29.241.402	9,07	10.708.166	4,67

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka perbaikan **) = angka sementara

Kesejahteraan Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial diarahkan kepada pembangunan bidang pendidikan yang merupakan proses secara sadar dalam rangka mempersiapkan dan mengembangkan potensi manusia hingga menjadi insan yang berkualitas dan produktif. Sampai dengan tahun 2010, kondisi pendidikan di Kabupaten Karawang masih diwarnai dengan berbagai isu pokok antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar juga persoalan mutu pendidik dan peserta didik. Berdasarkan data, angka rata-rata lama sekolah (RLS) tahun 2010 sebesar 7,11 tahun atau masih pada jenjang sekolah menengah pertama. Hal ini diperkuat dengan data penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan yang ditamatkan memperlihatkan prosentase penduduk tidak tamat SD sebesar 229 orang dan lulus SD sebesar 38.313 orang.

Kondisi RLS, dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang diperlihatkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada tahun 2010, partisipasi sekolah pada tingkat sekolah dasar memperlihatkan APK sebesar 109,62 persen, APM sebesar 96,48. Sedangkan pada tingkat SLTP memperlihatkan APK sebesar 86,52 persen dan APM sebesar 66,73 persen.

Kondisi kesiapan fisik ruang kelas dalam rangka penyediaan layanan pendidikan bagi siswa masih belum optimal. Berdasarkan data, penduduk bersekolah di Kabupaten Karawang tahun 2010, untuk jenjang SD/MI sebanyak 259.639 siswa, jenjang SMP/MTs sebanyak 103.383 siswa. Adapun jumlah rombongan belajar pada jenjang SD/MI sebanyak 7.244 rombel, jenjang SMP/MTs sebanyak 1.914 rombel. Dengan demikian rasio murid – kelas pada jenjang SD/MI sebanyak 1 : 35, jenjang SMP/MTs sebanyak 1 : 48. Kondisi tersebut relatif cukup memadai untuk jenjang SD/MI, namun perlu perhatian khusus untuk jenjang SMP/MTs.

Standar minimal mensyaratkan bahwa seorang guru SD/MI minimal memiliki pendidikan Diploma II (D2), D3 untuk SMP/ MTs dan S1 untuk SMA/SMK/ MA. Data tahun 2009 memperlihatkan tenaga pengajar tingkat SD/MI sebagian besar masih berkualifikasi lulusan PG setara SLTA dan D-II yang mencapai 3.587 orang. Sedangkan untuk kondisi tenaga pengajar di tingkat SLTP dari data yang ada telah menunjukkan kualifikasi yang cukup memuaskan yaitu didominasi pada kualifikasi lulusan S1 yang mencapai 874 dari jumlah 1.086 orang.

Pelayanan pendidikan anak usia dini juga belum berkembang. Hal ini selain dikarenakan pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD masih minim, sarana dan prasarana serta lembaga pengelolaan PAUD masih kurang dan belum terpadu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang, namun secara pemanfaatan sudah mulai dilakukan rintisan-rintisan diberbagai sektor pemerintah daerah, terutama terkait dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan (kaji terap), penerapan teknologi informatika dan aplikasi teknologi pertanian. Khususnya untuk kegiatan penelitian telah banyak dilakukan dalam

rangka perbaikan pelayanan publik, namun demikian secara aplikatif masih sangat sulit untuk diterapkan.

Kesehatan

Angka harapan Hidup di Kabupaten Karawang pada tahun 2010 mencapai 66,85 dan angka kematian bayi sebesar 191 orang per 1000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/ penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga erat berkaitan dengan kondisi pada fase kehamilan. Sampai dengan tahun 2010, Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan ibu dan anak. Dari 136.946 balita sekitar 90,59 persen kelahirannya ditolong oleh bidan dan dokter, sedangkan sisanya sekitar hanya 9,41 persen ditolong oleh dukun bayi atau paraji. Dari data tersebut, sekitar 9,41 persen proses pertolongan persalinan masih dilakukan oleh dukun bayi. Artinya sejumlah persalinan tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan pasca persalinan yang kurang baik termasuk kondisi alat bantu yang seadanya dibandingkan apabila dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan.

Air susu ibu (ASI) sangat penting artinya terhadap kesehatan balita. salah satu indikator yang bisa dilihat adalah lama menyusui. Dari seluruh balita di Karawang tahun 2010, sebanyak 136.946 balita atau 89,24 persen pernah diberi asi dengan lama menyusui rata-rata lebih dari 24 bulan. Dari angka tersebut Balita yang memperoleh layanan kesehatan (ditimbang) telah mencapai 176.075 atau sekitar 96 persen. Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan diperoleh temuan kasus Balita Gizi Buruk sebesar 3.237 jiwa atau sekitar 1,12 persen dari jumlah Balita yang ditimbang. kasus Balita Gizi Kurang dengan jumlah kasus terbesar terjadi pada tahun 2004 sebesar 17,81 persen. Dan pada tahun 2005 dapat diturunkan menjadi sekitar 13,27 persen atau sebesar 23.363 jiwa.

Cakupan pelayanan imunisasi rata-rata baru menjangkau 88-99%, yaitu BCG sebesar 99,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 71,32 persen, DPT sebesar 96,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,06 persen, Polio sebesar 93,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,28 persen, Campak

sebesar 96,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 62,87 persen, Hepatitis B sebesar 88,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 46,84 persen.

Selain indikator mortalitas, indikator lain yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate). Dilihat dari intensitas pola penyakit yang diderita oleh masyarakat antara lain Tuberkulosis (TB) paru, Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria, diare dan penyakit kulit. Selain itu, Karawang juga menghadapi *emergency deseas* seperti : Demam Berdarah Dengue (DBD), *Human immunodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome* (HIV/AIDS).

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Sarana dan Prasarana

1. Infrastruktur Jalan

Menurut statusnya pada tahun 2010, jaringan jalan di Kabupaten Karawang terdiri dari jalan negara sepanjang 50,55 km, jalan propinsi sepanjang 48,35 km, dan jalan kabupaten sepanjang 2.598,55 km. Untuk jalan kabupaten ditinjau dari konstruksinya 1.136,67 km (43,7 %) berupa jalan beraspal, 887,85 km (34,17 %) jalan kerikil dan 574,03 km (22,1 %) masih berupa tanah.

2. Energi Listrik

Kebutuhan akan energi listrik dilayani oleh PLN dan Non PLN. Sampai dengan tahun 2010 kapasitas terpasang yang dilayani oleh PLN sebesar 1.660.491.236 Kw dengan daya mampu sebesar 1.173.750 KVA.

3. Air Bersih

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, daerah diwajibkan untuk menyediakan air minum bukan hanya sekedar air bersih bagi masyarakat, oleh karenanya Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dari air bersih menjadi air minum. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM - Tirta Tarum adalah dari air permukaan yaitu dari air irigasi yang saat ini sangat tersedia. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan air dari

irigasi sangat mencukupi dan tidak memungkinkan penggunaan air dalam, karena kualitasnya kurang baik untuk air minum yang disebabkan oleh adanya intrusi air laut, terutama di wilayah Utara Kabupaten Karawang. Usaha penyediaan air bersih bagi penduduk di pusat-pusat permukiman dilakukan melalui instalasi air bersih ke rumah-rumah, penyediaan hidran/kran umum dan kran tangki air umum. Cakupan layanan PDAM sampai dengan Desember 2010 tercatat 45.735 sambungan rumah (16,12%). Adapun wilayah yang dilayani oleh PDAM saat ini mempunyai 6 cabang dan 9 IKK, yang mencakup 22 Kecamatan, 91 Desa dengan 334.220 jiwa. Tidak ada sistem yang dikelola oleh swasta atau oleh kelompok masyarakat, kecuali untuk beberapa industri dan hotel memiliki sistem penyediaan air minum perpipaan dengan skala kecil. Tingkat total pelayanan perpipaan untuk daerah Kabupaten Karawang terdiri dari jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 334.220 jiwa atau 16,12 %.

4. Persampahan

Cakupan pelayanan persampahan baru melayani sekitar 20% saja dari seluruh wilayah Kabupaten Karawang, terutama yang berada di pusat – pusat Ibu Kota kecamatan yang tersebar di Kabupaten Karawang. Rendahnya cakupan pelayanan ini, antara lain disebabkan karena luasnya wilayah Kabupaten Karawang, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, serta keterbatasan anggaran biaya yang tersedia. Saat ini sampah di buang ke lokasi tempat pembuangan akhir (TPA) Jalupang meskipun sudah ada lahan TPA Leuwisisir, namun TPA tersebut belum dimanfaatkan karena berbagai kendala yang ada, diantaranya jalan menuju TPA yang belum memadai. TPA Jalupang yang mempunyai luas sekitar 2,5 Ha berada di desa Wancimekar Kecamatan Kota Baru. Sistem pengelolaan dan pengolahan TPA masih dilakukan secara Open Dumping karena pada umumnya lebih mudah dan cepat serta tidak banyak mengeluarkan biaya operasi dan pemeliharaan. TPA Leuwisisir yang mempunyai luas sekitar 5 Ha berada di desa Mekar Mulya Kecamatan Teluk Jambe Barat. TPA Jalupang direncanakan untuk melayani daerah – daerah di sekitar kawasan Cikampek dan sekitarnya, yaitu Kecamatan Kota Baru, Cikampek, Jatisari,

Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan dan Kecamatan Purwasari, sedangkan TPA Leuwisisir melayani sekitar kawasan Kota Karawang dan sekitarnya yaitu Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe Barat, Telukjambe Timur, Klari, Majalaya, Talagasari dan Wilayah Rengasdengklok yang meliputi Kecamatan Rengasdengklok, Pedes dan Batujaya. TPA Jalupang sebenarnya sudah mulai jenuh karena hampir 90% dari total lahan yang sudah ada dimanfaatkan untuk pembuangan sampah secara Open Dumping, melalui sel-sel/galian tempat pembuangan dengan kedalaman rata-rata 7 meter. Sehingga untuk kedepan diperlukan perluasan area lahan TPA. Sedangkan TPA Leuwisisir saat ini belum beroperasi dan masih terdapat lahan-lahan dan bangunan yang tidak dimanfaatkan termasuk IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). Belum beroperasinya TPA Leuwisisir ini, disebabkan karena sebagian besar sampah-sampah yang seharusnya di buang ke TPA ini, ternyata masih banyak yang buang ke TPA Jalupang. Kurang berfungsinya TPA ini juga akibat jalan masuk yang masih kurang memadai dibandingkan dengan jalan menuju TPA Jalupang.

Pada periode tahun 2011 penanggulangan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran. Selain pembangunan infrastruktur jalan, bersamaan dengan itu dibangun juga infrastruktur jembatan di ruas jalan yang membutuhkan jembatan dan didalamnya termasuk pembangunan gorong-gorong/*box culvert*. Pada prinsipnya pembangunan jalan harus sebanding atau diikuti dengan jembatan pada ruas yang ditangani, karena merupakan satu kesatuan ruas jalan. Pemerintah Kabupaten Karawang juga membangun infrastruktur dalam bidang pengairan irigasi, yang di dalamnya adalah pembangunan/rehabilitasi/normalisasi sejumlah saluran dari mulai saluran sekunder, tersier dan saluran penunjang lainnya, di samping itu juga membangun bangunan air lainnya, seperti pintu air, embung/dam mini, yang semuanya adalah untuk menunjang sistem pertanian, khususnya padi sawah yang sangat erat hubungannya dengan produktivitas petani secara menyeluruh.

Tabel. 2.11
Analisa Perbandingan Kinerja Sasaran Dinas Bina Marga
dan Pengairan Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	REALISASI	
		2010	2011
1	Terlaksananya peningkatan jalan kabupaten minimal 80 km	83,48 km	100,48 km
2	Terlaksananya rehabilitasi jalan & bahu jalan kabupaten minimal sepanjang 40 km	21,45 km	21,18 km
3	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan kabupaten minimal sepanjang 350 km	316,25 km	319,72 km
4	Terlaksananya penyirtuan jalan desa minimal 100,00 km	21,45 km	44,07 km
5	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan/ pelebaran/ penggantian jembatan minimal 4 unit	948,50 M'	4 unit/716 M'
6	Terlaksananya pembuatan turap & badan jalan minimal 12 km	2.004 M'	1.889 M'
7	Terlaksananya pembuatan/ perbaikan assainerring/drainage minimal 2.000 M'	1.596 M'	2.000 M'
8	Terlaksananya pembangunan jembatan minimal 8 unit	224 M'	119 M'
9	Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi minimal 100,00 km	20,93 km	20,00 km
10	Terlaksananya rehabilitasi/ perbaikan jaringan irigasi minimal 25 km	12,77 km	13,88 km
11	Terlaksananya pengerukan & normalisasi jaringan irigasi minimal 10 km	-	-
12	Terlaksananya pembuatan turap, talang air, pintu air, bangunan bagi, bendung, saluran minimal 1 km/6 unit dan pembinaan pengelolaan jaringan irigasi	9 unit	6 unit
13	Terlaksananya rehabilitasi, pengerukan dan normalisasi sungai, saluran pembuan dan muara minimal 10 km	12,77 km	10,77 km
14	Terlaksananya pembangunan pengamanan daerah abrasi pantai minimal 800 M'	-	-
15	Terlaksananya rekrutmen waker sebanyak 400 orang; terlaksananya pembinaan waker sebanyak 400 orang	400 orang	400 orang
16	Terlaksananya pengadaan alat berat dan dump truck	-	-

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Dalam pelaksanaan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten minimal 80 Km pertahunnya, pada tahun 2011 mengalami kenaikan. Dari tabel terlihat realisasi peningkatan jalan pada tahun 2011 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2010.

Tabel 2.12
Realisasi Program-program Peningkatan Jalan/Jembatan
Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	REALISASI	
		2010 (Km)	2011 (Km)
1	Peningkatan Jalan Kabupaten	83,48	100,48
2	Pembangunan Jalan Kabupaten	21,45	21,18
3	Peningkatan Jembatan Kabupaten	-	-
4	Pembangunan Jembatan Kabupaten	0,224	0,119
	JUMLAH	105,154	102,299

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Pelaksanaan program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong minimal 2.000 M' pertahunnya, secara umum dapat terpenuhi dengan baik, dengan realisasi pencapaian rata-rata lebih dari 100%.

Tabel 2.13
Realisasi Program-program Pembagunan Drainase/Gorong
Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	REALISASI	
		2010 (Km)	2011 (Km)
1	Pembangunan drainase/gorong	1,596	2,000
	JUMLAH	1,596	2,000

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Pelaksanaan pembangunan turap/talud/bronjong minimal 1.000 M' mengalami penurunan, demikian pula dengan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan minimal sepanjang 40 Km, sedangkan rehabilitasi/pemeliharaan jalan mengalami peningkatan hingga akhir tahun rencana, seperti tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Realisasi Program-program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan/Jembatan Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	REALISASI	
		2010 (Km)	2011 (Km)
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	316,25	319,72
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	0,9485	0,716
3	Pembuatan turap dan badan jalan	2,004	1,889
	JUMLAH	319,2025	322,325

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Dalam halantisipasi dan penanggulangan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan serta pengairan/jaringan irigasi terkait bencana alam, dilaksanakan program tanggap darurat jalan,

jembatan dan pengairan. Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Karawang adalah banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai-sungai yang melintas kota Karawang, diantaranya sungai Citarum dan Cibeet, serta curah hujan yang tinggi dan naiknya muka air laut saat air pasang terjadi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah, perbaikan tanggul, pengadaan karung dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan yang rusak akibat banjir.

Salah satu bentuk dukungan terhadap sektor pertanian, adalah dilaksanakannya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya minimal 40,00 Km dan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya minimal 40 Km.

Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat, sehingga perannya sangat vital bagi program ketahanan pangan nasional, kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk menjaga Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat adalah pengembangan, pengelolaan pada daerah irigasi dengan luasan dibawah 1.000 Ha

Tabel 2.15
Realisasi Program-program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	REALISASI	
		2010 (Km)	2011 (Km)
1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	12,77	13,88
2	Pemeliharaan jaringan irigasi	20,93	20,00
	JUMLAH	33,70	33,88

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya diperlukan untuk menjaga kelestariannya dalam rangka menjaga fungsinya untuk menyokong pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Karawang memiliki banyak sungai, situ serta sumber air tanah.

Tabel 2.16
Realisasi Program-program Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air
Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	REALISASI	
		2010 (Km)	2011 (Km)
1	Normalisasi saluran pembuang	12,77	10,77
2	Pembangunan pengamanan daerah pantai	-	-
	JUMLAH	12,77	10,77

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

Pelayanan dan daya dukung yang prima bagi pengguna sarana dan prasarana transportasi jalan, jembatan dan pengairan dapat terpenuhi dengan baik. Secara kuantitatif data kondisi infrastruktur jalan, jembatan, pengairan/jaringan irigasi hingga tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Kondisi Jalan, Jembatan dan Pengairan/Jaringan Irigasi
di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011

STATUS	VOLUME (KM)	KELAS TONASE	BAIK (KM)	SEDANG (KM)	RUSAK (KM)	KET
- Jalan Negara	46,34	II	23,17	23,17	-	
- Jalan Provinsi	48,19	III A	24,09	24,10	-	
- Jalan Kabupaten	861,73	III A**	430,8	258,53	172,34	
- Jalan Layang (<i>Fly Over</i>)	2,80	III A	6	-	-	
	28,60	III	2,80	-	-	
- Jalan Tol	1.778,30	**	28,60	533,49	355,66	
- Jalan Desa	-		889,1	-	-	
- Assainering/ drainage			5			
- Jembatan Negara	2,19		1,09	1,10	-	57
- Jembatan Provinsi	0,16		0,08	0,08	-	buah
- Jembatan Kabupaten	2,55		1,02	1,53	-	6 buah
						178 buah
- Bendung	4 buah		2,00	2,00	-	
- Bangunan Bagi/Sadap dan bangunan lainnya	382 buah		115,0	229,00	38,00	
	120,00		0	40,00	40,00	
- Saluran Induk	589,60		40,00	353,76	58,96	
- Saluran Sekunder			176,8			
			8			
- Citarum	60,00		-	-	-	
- Cibeet	35,00		-	-	-	
- Cigentis	20,00		-	-	-	
- Kali Cilamaya	30,00		-	-	-	
- Situ	12 buah		-	-	-	
- Saluran Pembuang	912,00		273,6	547,20	91,20	
- Muara	27 buah		0	-	-	
- Pantai	57,00		-	34,20	5,70	
			17,10			

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang Tahun 2011

Tabel 2.18
Realisasi Program-program Peningkatan Sasaran Perencanaan
dan Database Jalan, Jembatan serta Pengairan
Tahun 2010-2011

NO	URAIAN	REALISASI	
		2010 (Paket)	2011 (Paket)
1	Penyusunan perencanaan jalan, jembatan dan pengairan	432	452
2	Pembangunan sistem informasi/ database jalan, jembatan dan pengairan	-	-
3	Penyusunan DED perencanaan fisik tertentu	1	-
	JUMLAH	433	452

Sumber : Dinas Bina Marga & Pengairan Kabupaten Karawang

SDA dan Lingkungan Hidup

1. Pertanian

Hasil evaluasi selama 10 tahun ke belakang ternyata lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non pertanian rata-rata 181,87 Ha per tahun, dengan rincian untuk keperluan rumah tinggal (1,5 %), peruntukan perumahan/BTN (54,6 %), industri (34,4 %) dan Jasa (9,5 %). Pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), apabila tidak dapat dihindari harus menggunakan lahan pertanian maka diupayakan ada kompensasi dalam bentuk pencetakan sawah teknis/perbaikan saluran air/pembelian pompa air. Produktivitas usahatani padi, palawija, hortikultura dan perkebunan belum optimal, sehingga pendapatan yang diperoleh petani rendah. (rata-rata produktivitas padi selama 10 tahun 61,69 kwintal/Ha). Kalau dilihat dari potensi hasil padi, maka produktivitas tersebut masih dapat ditingkatkan lagi dengan syarat menggunakan kawalan teknologi anjuran seperti: SRI, PTT, benih padi hibrida dan menekan kehilangan hasil (*losses*). Kehilangan hasil padi di Kabupaten Karawang rata-rata sebesar 16,47 %. Kabupaten Karawang merupakan daerah lumbung padi Jawa Barat dan penghasil sayuran dataran rendah yang cukup potensial dengan produk unggulan diantaranya adalah jamur merang. Pengembangan potensi tersebut didukung dengan potensi lahan pertanian :

a. Potensi tanaman padi sawah

- Luas baku sawah : 93.456 Ha.
 - Sawah pengairan teknis : 81.698 Ha
 - Sawah setengah teknis : 4.256 Ha
 - Sawah pengairan sederhana : 3.857 Ha
 - Sawah tadah hujan : 3.645 Ha
- Luas pemanfaatan lahan sawah
 - Ditanami padi 2 kali satu tahun : 90.393 Ha
 - Ditanami padi 1 kali satu tahun : 2.170 Ha
 - Ditanami tanaman sayuran/palawija : 893 Ha

b. Lahan sawah teknis berdasarkan golongan air (Sumber : PJT II) :

- Golongan air I : 21.384 Ha
- Golongan air II : 27.031 Ha
- Golongan air III : 21.736 Ha
- Golongan air IV : 15.942 Ha
- Golongan air V : 19.728 Ha

c. Potensi Holtikultura

Potensi produksi sayuran di Kabupaten Karawang sangat tinggi dengan jenis sayuran antara lain : kacang panjang, mentimun, terong, caisin, kangkung, bayam, cabe merah, dan jamur merang.

2. Sumberdaya air

Sumber daya air yang dimanfaatkan dalam pengembangan pertanian di Kabupaten Karawang sebagian besar diambil dari Waduk Jatiluhur. Dari waduk tersebut air dialirkan ke Daerah Irigasi Tarum Barat, Tarum Timur dan Tarum Utara melalui Sungai Citarum, dengan pengambilan nerupa bendung. Dari bendung selanjutnya air dialirkan lagi ke Daerah Irigasi melalui Saluran Induk, saluran sekunder, saluran tertier dan kwarter, untuk mengairi areal persawahan di wilayah Kabupaten Karawang. Air dari Waduk Jatiluhur dialirkan ke Daerah Irigasi Tarum Barat dan Tarum Timur melalui pengambilan Bendung Curug, sedangkan air yang dialirkankan ke Daerah Irigasi Tarum Utara melalui Bendung Walahar. Selain memanfaatkan air dari Waduk Jatiluhur, beberapa daerah irigasi di Kabupaten Karawang juga memanfaatkan sumber

daya air dari sungai-sungai yang ada. Di antaranya adalah Daerah Irigasi Pundong yang memanfaatkan air sungai Cibinong melalui Bendung Pundong. Daerah Irigasi Barugbug memanfaatkan air Sungai Cilamaya melalui Bendung Barugbug. Daerah Irigasi Waru melakukan pengambilan bendung Waru dengan memanfaatkan air sungai Cigentis. Daerah Irigasi Cibeet melakukan pengambilan melalui bendung Cibeet dengan memanfaatkan air sungai Cibeet. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka penyelenggaraan dan pengelolaan irigasi di Kab. Karawang adalah sebagai berikut :

a. Pada Daerah Irigasi (DI) di atas 3.000 Ha menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu terdiri dari :

- 1). DI Tarum Barat, dengan luas areal : 3.781 Ha.
- 2). DI Tarum Timur, dengan luas areal : 10.973 Ha.
- 3). DI Tarum Utara, dengan luas areal : 87.431 Ha.

Sistem pengelolaannya dilaksanakan oleh BBWS Citarum dan Perum Jasa Tirta II.

b. Pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas areal 1.000 s/d 3.000 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu pada DI Pundong dengan luas areal 1.450 Ha sistem pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat.

c. Pada Daerah Irigasi (DI) dengan luas areal di bawah 1.000 Ha, yaitu pada DI Barugbug, DI Waru, DI Tonjong, DI Parakan Badak dan daerah-daerah irigasi lain yang memiliki luas areal di bawah 1.000 Ha sistem pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.

3. Sumberdaya akuatis

Dengan luas laut yang dimiliki Kabupaten Karawang, sektor perikanan memiliki potensi yang tidak kecil oleh, berdasarkan data tahun 1995 produksi ikan budidaya sebesar 26.234,4 ton dan mengalami kenaikan cukup baik pada tahun 2005 yaitu sebesar

31.691,4 ton. Produksi ikan tangkap juga tidak kalah mengembirakan karena menurut data statistik terjadi kenaikan 8,6 persen dari 9,974.5 ton di tahun 1995 menjadi 10,835.7 ton di tahun 2005. Kabupaten Karawang memiliki panjang pantai lebih kurang 73 Km dan sejumlah muara yang dapat dilalui oleh perahu nelayan berkapasitas besar sehingga potensi perikanan dapat dikembangkan. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan di kabupaten karawang anatar lain ; Budi daya Ikan Tambak (payau), budi daya ikan kolam air tawar (darat) dan budi daya hasil tangkapan baik dilaut maupun di perairan umum. Sarana dan prasarana pengembangan budi daya perikanan yang ada adalah :

- Budidaya air payau (tambak) seluas 13.831 Ha
- Budi daya kolam darat seluas 180 Ha
- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 11 unit
- Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT) 14 unit

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, salah satu kewenangan yang dilimpahkan kepada kabupaten adalah pengelolaan 4 mil laut. Dari kewenangan tersebut potensi sumber daya alam berupa hutan bakau, minyak bumi dan gas serta sumber daya laut terkandung didalamnya merupakan sumber pendapatan masyarakat maupun pemerintah (PAD), namun pengelolaannya belum optimal mengingat keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat maupun kurangnya aparatur profesional dalam pengelolaan kawasan pesisir.

4. Sumberdaya mineral

Kabupaten Karawang memilik berbagai jenis sumber daya mineral dan yang paling besar adalah Bahan Galian C. Dari jenis bahan mineral tersebut yang paling banyak ditambang dan dimanfaatkan adalah jenis bahan galian untuk bahan bangunan seperti batu belah, pasir dan sirtu. Sedangkan jenis bahan galian untuk industri manufaktur dan pertanian belum dimanfaatkan secara maksimal.

5. Sumberdaya Hutan

Berdasarkan fungsinya hutan memiliki fungsi ekologi/konservasi dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi ekologi hutan menghisap udara karbon (CO₂) dari udara dan mengembalikan oksigen (O₂) bersih pada manusia disamping berfungsi sebagai pengatur tata air. Sedangkan sebagai fungsi ekonomi, hutan memiliki nilai manfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu berupa hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Keberadaan hutan di Kabupaten Karawang telah mengalami degradasi baik fungsi maupun luasannya, salah satu dampaknya adalah terjadinya lahan kritis. Luas lahan kritis di Kabupaten Karawang berdasarkan data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan seluas 31.466,90 Ha, terdiri dari 10.624,90 Ha hutan kritis di dalam kawasan hutan (darat 4.120,90 Ha dan pantai 6.504 Ha) dan 20.842 Ha hutan kritis di luar kawasan hutan/milik masyarakat (darat 14.338 Ha dan pantai 6.504 Ha). Terjadinya lahan kritis tersebut pada umumnya disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dan akibat yang sering terjadi longsor di daerah perbukitan dan banjir di daerah dataran atau hilir. Upaya Pemerintah Daerah dalam penanganan lahan kritis dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, salah satunya adalah pengembangan hutan rakyat. Selain hutan rakyat, Kabupaten Karawang juga memiliki hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui KPH Purwakarta yaitu seluas 20.031,98 Ha terdiri dari hutan produksi 7.035,28 Ha dan hutan lindung darat 4.260,80 Ha dan hutan lindung pantai 8.735,90 Ha. Dengan demikian luas hutan keseluruhan mencapai 27.256,98 Ha atau 15,54 % dari seluruh wilayah Kabupaten Karawang.

6. Lingkungan Hidup

Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten masih memerlukan perhatian untuk mengantisipasi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dalam bentuk : (1) Rehabilitasi lingkungan; yaitu dengan : melakukan upaya penghijauan melalui

penanaman pohon baik pohon pelindung maupun pohon produktif melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), Kegiatan Hutan Rakyat serta kegiatan pengkayaan hutan, selain itu juga dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui pengelolaan persampahan, pembuatan dan perbaikan drainase jalan, pemeliharaan tanaman/penghijauan, pengerukan sungai/saluran pembuangan ;(2) Kajian lingkungan, yaitu melalui pendataan perusahaan penghasil limbah industri, mengintensifkan laporan monitoring masing-masing industri, pengujian kualitas air, udara dan Baku Mutu Pencemaran dan kerusakan lingkungan; (3) Penegakan hukum, yaitu melalui pengawasan dan pengendalian rutin ke perusahaan-perusahaan yang ada di zona dan kawasan industri dalam bentuk pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lapangan, selain itu juga dilakukan penanganan dan pelayanan pengaduan pencemaran lingkungan serta penertiban perijinan bidang lingkungan hidup; (4) Meningkatkan peran masyarakat melalui sosialisasi pada pihak industri, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan, unsur pemerintah dan lainnya; dan (5) Penguatan kelembagaan lingkungan hidup, diantaranya melalui pengembangan sarana laboratorium lingkungan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta penyusunan produk hukum bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.19
Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang Dimiliki oleh Industri
di Kab. Karawang Tahun 2010-2011

No	Uraian	Jumlah	
		2010	2011
1	Industri yang memiliki AMDAL	15	16
2	Industri yang memiliki UKL/UPL	382	459
3	Industri yang memiliki SPPL	3	8

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

Tabel 2.20
Pengelolaan Lingkungan yang dilaksanakan BPLH
Tahun 2010-2011

No	Uraian	Jumlah	
		2010	2011
1	Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan hidup di perusahaan	50 perusahaan	160 perusahaan
2	Pengambilan sampel uji air sungai	22 titik	36 titik
3	Pengambilan sampel uji air limbah industri	-	34 titik
4	Pengambilan sampel uji udara emisi	15 titik	20 titik

No	Uraian	Jumlah	
		2010	2011
	cerobong industri		
5	Verifikasi TPS limbah B3 dari perusahaan di kawasan dan zona industri	57 lokasi	92 lokasi
6	Penanganan kasus lingkungan hidup	8 kasus	8 kasus
7	Jumlah LSM lingkungan Hidup : (GALIH - Gerakan Lingkungan Hidup; PSPLP - Pengembangan Strategi Pemberdayaan Lingkungan Petani; Biharia Lingkungan Hidup; LP2D - Lembaga Lingkungan dan Pembangunan Daerah; Sar Sagara, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI DPC Karawang); UPAS, Korak, Lodaya, Sepetak, Laskar Karawang dan AMIB)	12 LSM	12 LSM
8	Produk hukum bidang pengelolaan LH a. Peraturan Daerah b. Peraturan Bupati c. Keputusan Bupati	11 buah 5 buah -	7 buah 3 buah 5 buah

Sumber : Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Karawang

Rehabilitasi lahan kritis di Kabupaten Karawang dilakukan melalui kegiatan penghijauan dan serta reklamasi yang penanganannya dilaksanakan secara terpadu dan lintas sektor bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang, selain itu juga dilakukan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman pohon.

Tabel 2.21
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Statusnya

No	Uraian	Luas (Ha)	
		2010	2011
A.	Kawasan Konservasi	-	-
	1. Cagar Alam	-	-
	2. Suaka Margasatwa	-	-
	3. Taman Wisata	-	-
	4. Taman Buru	-	-
	5. Taman Nasional	-	-
	6. Taman Hutan Raya	-	-
B.	Hutan Lindung	8.454	8.454
C.	Hutan Produksi		
	1. Hutan Produksi Terbatas	12.355	12.355
	2. Hutan Produksi Konservasi	2.897	2.897
	3. Hutan Kota	2	2

Sumber Data: Tahun 2010 dan 2011 dari Dinas Pertanian dan Kehutanan

Hutan mangrove di Kabupaten Karawang tersebar di sembilan kecamatan, yaitu : Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya,

Cibuaya, Pedes, Cilebar, Tempuran, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan. Potensi koloni hutan mangrove yang terbesar terdapat di Kecamatan Tirtajaya, Cibuaya, Cilebar dan Cilamaya, sedangkan di kecamatan-kecamatan lainnya hanya bersifat setempat dengan jumlah pohon yang tinggal beberapa batang saja. Mengingat mangrove lebih cocok tumbuh di tanah yang berpasir lumpur, khusus di daerah Pakisjaya yang struktur tanahnya hanya berpasir dan tidak berlumpur, vegetasi didominasi oleh tanaman pakis atau Pinus merkusii, bukan vegetasi mangrove.

Tabel 2.22
Luas Hutan Mangrove Wilayah Kecamatan dan Jumlah
Desa/Kelurahan Tahun 2011

No.	Kecamatan	Desa	Luas Desa (Ha)	Panjang Garis Pantai (km)	Luas Hutan Mangrove (Ha)
1.	Pakisjaya	Tanjungpakis	1.828	11,25	1.050
2.	Batujaya	Segarjaya	1.626	2,25	1.004
3.	Tirtajaya	Tambaksari	2.475	6	456
4.	Cibuaya	Sedari	2.518	12	150
		Cemarajaya	1.031	8	120
5.	Pedes	Sungaibuntu	996	4,5	520
6.	Cilebar	Pusakajaya Utara	866	6,3	23
		Mekarpohaci	872	2,25	203
7.	Tempuran	Tanjungjaya	1.008	1,7	150
		Sumberjaya	686	0,6	3
		Cikuntul	547	0,8	11
		Tempuran	479	1	-
		Ciparagejaya	480	2,5	248
8.	Cilamaya Kulon	Pasirjaya	862	0,9	47
		Sukajaya	620	3,6	45
9.	Cilamaya Wetan	Sukakerta	732	1	59
		Rawagempol Kulon	548	1,7	36
		Muara Baru	738	4,5	105
		Muara	1.569	2,8	489
	JUMLAH		20.481	73,65	4.719

Lahan menjadi hal pokok bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. Tersedianya kebutuhan lahan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu diatur dan dikembangkan oleh Pemerintah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terpadu dan konsisten.

1. Luas Lahan Kritis

Jumlah total lahan kritis di Kabupaten Karawang pada tahun 2011 8.894 bila dibandingkan dengan tahun 2010, yakni seluas 8.800 Ha. Perbandingan luas lahan kritis tahun 2010 s.d. 2011, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Perbandingan Luas Lahan Kritis Tahun 2010 s.d. 2011

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	
		2010	2011
1.	Pakisjaya	1.572	1.572
2.	Ciampel	1.272	1.272
3.	Tegalwaru	1.134	1.134
4.	Batujaya	1.004	1.004
5.	Tirtajaya	830	830
6.	Cilamaya Wetan	689	664
7.	Pedes	520	520
8.	Telukjambe Timur	500	500
9.	Tempuran	412	412
10.	Telukjambe Barat	322	322
11.	Cibuaya	270	270
12.	Cilebar	226	226
13.	Pangkalan	132	132
14.	Cilamaya Kulon	92	92
TOTAL		8.975	8.950

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang (data 2011)

Analisis lahan kritis adalah sebagai berikut :

- a. Lahan kritis di Kabupaten Karawang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Urutan dari yang terluas lahan kritisnya adalah kecamatan : Pakisjaya, Ciampel, Tegalwaru, Batujaya, Tirtajaya, Cilamaya Wetan, Pedes, Telukjambe Timur, Tempuran, Telukjambe Barat, Cibuaya, Cilebar, Pangkalan dan Cilamaya Kulon.
- b. Kecamatan Pakisjaya mempunyai lahan kritis terluas, yakni 1.572 Ha atau hampir 40% dari luas area se-kecamatan. Kecamatan Cilamaya Kulon lahan kritisnya sekitar 92 Ha .

2. Luas Kerusakan Lahan

Data kerusakan hutan selama tahun 2011 adalah terjadinya kerusakan sebagian kawasan hutan di Kabupaten Karawang yang disebabkan oleh faktor alih fungsi hutan menjadi tambak, dan luas kerusakan hutan pada tahun 2011 adalah sebesar \pm 2.000 Ha (sekitar 25% dari total luas hutan di Karawang).

3. Luas Konversi Hutan

Data konversi hutan pada tahun 2008 telah terjadi konversi hutan atas nama PT. Atlasindo sebesar 14 Ha (sekitar 0,006% dari total luas hutan), sedangkan pada tahun 2011 tidak ada konversi hutan.

Secara umum pelestarian sumberdaya alam dilakukan dengan tujuan untuk : (1) memantapkan, melindungi dan mengamankan keberadaan kawasan hutan sebagai aset negara dan (2) menjaga fungsi serta memulihkan hutan dan lahan kritis.

Program rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan dalam rangka mengurangi lahan kritis, baik untuk hutan darat maupun hutan pantai. Hasil Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) dan Gerakan Rehabilitasi Hutan (GERHAN) yang dimulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 telah berhasil melakukan penanaman untuk mengurangi lahan kritis seluas 800 Ha, seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Darat di Luas Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2010	3.198	25	3.173
2.	2011	3.173	125	3.043

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang

Tabel 2.25
Perkembangan Rehabilitasi Lahan Kritis untuk Lahan Hutan Pantai di Luar Kawasan Hutan

No.	Tahun	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Penanaman (Ha)	Sisa Lahan Kritis (Ha)
1.	2010	5.615	-	5.615
2.	2011	5.615	140	5.475

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Karawang

Pemerintahan

1. Kewenangan/ urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang saat ini adalah 21 urusan wajib dan 5 urusan pilihan Berdasarkan kewenangan pemerintahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan upaya penyesuaian regulasi antara lain perbaikan SOTK dan mekanisme serta hubungan kerja antar OPD.

2. Dengan melihat pada tujuan strategis otonomi daerah diperlukan adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat, baik posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai legislatif sebagaimana telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada tahun 2010, dengan sebelumnya pada tahun 2009 telah dilaksanakan pemilihan legislatif.
3. Dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja, setiap tahun Bupati menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kinerja program dan kegiatan di tingkat SKPD selalu dievaluasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (LAKIP). Upaya pengurangan praktek korupsi aparatur dilaksanakan melalui jalur pengawasan fungsional.
4. Penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat umum telah dilaksanakan dalam bentuk publikasi kegiatan dan hasil pembangunan melalui berbagai media. Beberapa pelayanan administrasi publik telah dilaksanakan antara lain pelayanan administrasi kependudukan maupun administrasi perizinan.
5. Peningkatan kompetensi aparatur dilaksanakan melalui pola pengembangan karir baik dalam bentuk diklat maupun promosi jabatan. Jumlah Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2010 berjumlah 14.436 orang terdiri dari : Gol I 226 orang, Gol II 3.784 orang, Gol III 5.317 dan Gol IV 5.209 orang.
6. Fasilitasi, regulasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa telah dilakukan, namun masih memerlukan berbagai perkuatan baik pada tataran regulasi maupun implementasi terkait dengan sumberdaya dan kelembagaan pemerintahan desa.

Perhubungan

Pembangunan di bidang Perhubungan selama ini menunjukkan hasil yang positif. Dengan pembuatan trayek-trayek baru bagi angkutan umum sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu selain dapat membantu mendorong roda perekonomian dapat juga meningkatkan kelancaran aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta membuka akses-akses baru ke daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau oleh angkutan umum. Selain itu, juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.26
Pelayanan Ijin Pengusaha Angkutan berdasarkan jenis angkutan Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Truck Umum	410	165
2	Truck T. Umum	2.286	830
3	Truck Tangki	46	21
4	Pick Up	4.559	1.595
5	Box	1.479	516
6	BIS	71	16
7	Micro	154	45
8	Mini Bis 10 Seat	1.177	412
9	Mini Bis 14 Seat	138	49
	Total	10.320	3.649

Sumber : Dishubkominfo Kab. Karawang (data dari Januari s.d. April 2011)

Dasar : Surat Edaran Bupati Nomor : 973/1294/DPPKAD, tanggal 20 April 2011, perihal Penghentian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2.27
Pelayanan Ijin Trayek Angkutan Tahun 2010-2011

No	Jenis	Tahun	
		2010	2011
1	Trayek		
	- SK	495	588
	- KP	1.417	1.719
	- Denda (kali)	-	3.144
2	Karyawan		
	- SK	71	76
	- KP	362	359
	- Denda	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Karawang
Ket: SK= Surat Keputusan; KP= Kartu Pengawasan.

Tabel 2.28
Pelayanan Ijin Bongkar Muat dan Pengujian Kendaraan
Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Ijin Bongkar Muat	10.102	3.650
2.	Pengujian Kendaraan	14.188	21.941

Sumber : Dishubkominfo Kab. Karawang (data s.d. April 2011)

Data pelayanan Ijin Bongkar Muat dan Pengujian Kendaraan Januari s.d. April 2011

Dasar : Surat Edaran Bupati Nomor : 973/1294/DPPKAD, tanggal 20 April 2011, perihal Penghentian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Tabel 2.29
Pelayanan Ijin Insidentil Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Bis Mikro	186	119
2	Bis Mini	21	3
3	Bis	243	7

Sumber : Dishubkominfo Kab. Karawang (data Januari s.d. Desember 2011)

Tabel 2.30
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Dihasilkan dari Bidang
Perhubungan Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun (Rp)	
		2010	2011
1	Ijin Pengusaha Angkutan	161.330.000,00	58.105.000,00
2	Ijin Bongkar Muat	75.765.000,00	27.375.000,00
3	Pengujian Kendaraan	743.904.700,00	819.175.100,00
4	Ijin Insidentil	2.260.000,00	710.000,00
5	UPTD Terminal	296.312.000,00	225.451.300,00
6	UPTD Parkir	531.486.730,00	987.534.556,00
7	Ijin Trayek	119.818.750,00	150.191.250,00

Sumber : Dishubkominfo Kab. Karawang (data Januari s.d. April 2011)

Perumahan

Perumahan merupakan salah satu aspek penting yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karawang, yang dijabarkan sebagai berikut : Terwujudnya tata ruang yang mampu memberikan akses terhadap tumbuh dan berkembangnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat secara memadai dan seimbang antara tata guna lahan, sistem transportasi, bangunan privat dan publik serta jaringan utilitas masyarakat. Hal tersebut kemudian diarahkan pada pembangunan kawasan permukiman dan perumahan yang lebih murah dan sebesar-besarnya melibatkan peran swasta, manajemen

pengelolaan air bersih guna peningkatan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan air bersih jaringan pipa melalui pembangunan instalasi produksi dan jaringan pipa distribusi yang baru, peningkatan kemampuan jangkauan instalasi penjernihan air guna menjamin kualitas air bersih, rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran, pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap sumber air baku. Pembangunan prasarana permukiman jalan lingkungan guna memberikan akses bagi penduduk setempat melakukan aktifitas sosial ekonomi dan menghubungkan pada jalan kolektor.

Perumahan terdiri atas 2 jenis, yaitu :

1. Perumahan Perkotaan

- a. Perumahan Swadaya (perkampungan non kompleks perumahan)
- b. Perumahan Kumuh
- c. Perumahan yang dibangun pemerintah (komplek perumnas)
- d. Perumahan yang dibangun swasta (komplek real estate)
- e. Rumah susun

2. Perumahan Perdesaan

- a. Perumahan swadaya (perkampungan non kompleks perumahan)

Penataan dan perbaikan lingkungan perumahan telah dilaksanakan setiap tahunnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemasangan jaringan distribusi air bersih, pembangunan MCK umum, pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan plesterisasi, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Pembangunan bidang perumahan Tahun 2010-2011

No	Uraian	Tahun	
		2010	2011
1	Penyedia Perumahan (developer)	6.631 unit	16.398 unit
2	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (unit)	12 unit	-
3	Pemasangan jaringan distribusi air bersih	3.578 M'	6.063 M'
4	Pembangunan MCK umum (unit)	19 unit	8 unit
5	Pembangunan jalan lingkungan (Km)	8.420 M'	-
6	Peningkatan Jalan Lingkungan (Km)	40.344 M'	41.116,5 M'

Sumber : Dinas Ciptakarya Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil pendataan perumahan di Kabupaten Karawang pada tahun 2011, diperoleh data perumahan swadaya masyarakat (non kompleks) sebanyak 488.251 unit dan perumahan yang dibangun oleh pengembang (komplek) sebanyak 16.398 unit dan dalam pengembangan sebanyak 21.416 unit. Jumlah total rumah yang terdata pada tahun 2011 sebanyak 505.124 unit yang artinya mengalami peningkatan jumlah rumah sebesar 3% dari tahun 2010.

Dari hasil pendataan perumahan yang dilakukan dan hasil analisis penduduk, diperoleh kebutuhan pembangunan perumahan dan kekurangan jumlah sesuai dengan tahun proyeksi rencana, yaitu proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Karawang tahun 2012 sebanyak 433.050 unit, tahun 2017 sebanyak 452.970 unit, tahun 2022 sebanyak 453.083 unit dan tahun 2030 sebanyak 512.565 unit.

Berdasarkan proyeksi kebutuhan rumah di Kabupaten Karawang tersebut, asumsi kebutuh rumah di Kabupaten Karawang untuk 10 tahun dan 15 tahun yang akan datang, mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. Dusun dengan proyeksi kebutuhan rumah terbesar adalah Kecamatan Karawang Timur, Klari, Cikampek, Rengasdengklok, Telukjambe Timur dan Kotabaru.

Komunikasi dan Informatika

Urusan wajib komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Bagian Humas Setda Kabupaten Karawang. Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa yang dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi lintas sektoral dalam menunjang TMMD dan atau Satata Sariksa, dengan capaian kinerja terlaksananya program pengembangan penyiaran informasi ke masyarakat di perdesaan melalui kegiatan penyuluhan dan keterampilan dalam rangka menunjang kegiatan non fisik TMMD. Kegiatan ke-87 pada tahun 2011 dilaksanakan di Desa Purwajaya dan Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran pada tanggal 11 Oktober s.d. 29 Oktober 2011;
2. Penerangan dan komunikasi terpadu dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dengan capaian kinerja penyebarluasan informasi mengenai program pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di semua sektor sebagai implementasi dari program prioritas pembangunan Kabupaten Karawang Tahun 2011. Adapun realisasi penyebarluasan informasi tersebut dilaksanakan melalui media :
 - a. Elektronik (siaran radio) dengan volume kegiatan :
 - 1) Siaran Ruang Hukum : 27 kegiatan (materi perundang-undangan)
 - 2) Siaran Pedesaan
 - b. Siaran Keliling (Wawar)
3. *Talk show* program pembangunan, dengan capaian kinerja : pelaksanaan *talk show* tentang program pembangunan di radio siaran swasta di Kabupaten Karawang dengan nara sumber dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
4. Pelayanan informasi lintas sektoral dalam menunjang BSMSS dan atau Satata Sariksa dengan capaian kinerja terlaksananya pelayanan informasi lintas sektoral dalam menunjang BSMSS di Kecamatan Rawamerta dengan kegiatan non fisik berupa penyuluhan, pembinaan dan keterampilan ke masyarakat desa bersama dengan OPD terkait;
5. Pelaksanaan pendataan potensi dari program pembangunan menara *Tower*/radio siaran dan warnet dalam prasarana

- informasi dan media massa melalui study banding dengan 4 kabupaten/kota, dengan capaian kinerja :
- a. Data *Tower* yang ada di wilayah Kabupaten Karawang yang telah terdata sampai dengan tahun 2011 sebanyak 188 rekomendasi persetujuan pembangunan *tower* yang sudah direkomendasikan dari kecamatan, Satpol PP Kab. Karawang, Dinas Cipta Karya Kab. Karawang, Bappeda Kab. Karawang dan Dishubkominfo Kab. Karawang.
 - b. Data warnet yang ada di wilayah Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 94 warnet yang direkomendasikan.
 - c. Untuk kegiatan studi banding telah dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota, diantaranya Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bandung dan Kota Bekasi, diharapkan pelaksanaan studi di ke 4 Kabupaten/Kota tersebut dapat menjadi masukan bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang *tower* yang nantinya dapat meningkatkan PAD Kabupaten Karawang.
6. Pembentukan dan pembinaan kelompok informasi wanita melalui P2WKSS, dengan capaian kinerja terbentuknya kelompok informasi wanita melalui P2WKSS yang telah dilaksanakan di Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Kulon pada tanggal 1 Mei s.d. 2 Nopember 2011, kegiatan P2WKSS tersebut dilaksanakan bersama dengan OPD terkait dengan tujuan untuk lebih meningkatkan peranan wanita di segala bidang menuju kepada keluarga sehat yang sejahtera;
7. Pengadaan bahan materi penerangan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan OPD di Kabupaten Karawang, dengan capaian kinerja terlaksananya pengadaan bahan materi penerangan berupa buku-buku bacaan untuk disebarluaskan ke Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Karawang sebagai bahan informasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
8. Sosialisasi Perundang-undangan No. 41 Tahun 2008, dengan capaian kinerja berupa pelaksanaan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di 15 kecamatan, yaitu

Kecamatan Banyusari, Cikampek, Kotabaru, Cilamaya Wetan, Jatisari, Purwasari, Ciampel, Telukjambe Timur, Karawang Timur, Karawang Barat, Klari, Tegalwaru Tirtamulya, Pangkalan dan Batujaya;

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dan Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa dilaksanakan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah, ditempuh melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Majalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
Penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk mempublikasikan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta menginformasikan dan mensosialisasikan hasil kegiatan yang telah dicapai. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 15.000 eksemplar.
2. Penyusunan sambutan, yang terdiri dari sambutan Bupati, Wakil Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP). Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 720 sambutan.
3. Penyampaian kegiatan hasil pembangunan melalui media elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempublikasikan hasil-hasil pembangunan melalui media elektronik sehingga dapat disosialisasikan pada masyarakat. Pada tahun 2011 telah terlaksana sebanyak 37 paket tayangan atau berita.
4. Kehumasan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menjalin kerjasama yang harmonis antara pemerintah daerah dengan para pencari berita sehingga dapat menyampaikan berita-berita pembangunan di berbagai media cetak, tahun 2011 dilaksanan pembinaan pada 10.500 pemberitaan.
5. Kemitraaan dengan media massa. Kegiatan ini ditangani secara khusus, sebagai upaya bermitra dengan para pencari berita di media cetak dalam mengcover berita-berita pembangunan pemerintah daerah. Pada tahun 2011 dapat terealisasi sebanyak 1.860 kemitraan.
6. Rubrik Pembangunan. Kegiatan ini berupa publikasi berkala yang menerbitkan berita-berita tentang Kabupaten Karawang

melalui media cetak. Realisasi pada tahun 2011 sebanyak 120 kali penerbitan.

7. Kegiatan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendokumentasikan setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi kegiatan ini pada tahun 2011 sebanyak 245 kegiatan.
8. Transfer Film Kegiatan Liputan. Kegiatan ini pada tahun 2011 terealisasi dengan hasil berupa film kegiatan hasil editing sebanyak 150 keping CD/VCD.
9. Pemeliharaan Jaringan Internet. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan jaringan internet di lingkup OPD. Pemeliharaan berupa penggantian/pemeliharaan HUB, swich, modem, wireless, maupun kabel serta koneksi internetnya. Pada tahun 2011 sebanyak 82 titik/jaringan.
10. *Update dan Upgrade Data Homepage* Kabupaten Karawang. Kegiatan ini merupakan *Up date*/pemutakhiran data-data pembangunan Kabupaten Karawang yang sudah di *up date* pada situs resmi Pemerintah Kabupaten Karawang, pada tahun 2011 terealisasi *update dan upgrade data homepage* sebanyak 32 OPD.
11. Pengolahan SMS *Gateway*. Kegiatan ini merupakan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah yang menampung segala kritikan, saran, dan pendapat dari masyarakat umum kepada Pemerintah Kabupaten Karawang melalui fasilitas SMS secara elektronik, yang selanjutnya jawabannya diumpun balikkan kembali kepada masyarakat penanya. Rata-rata jumlah SMS yang masuk ke dalam program *Gateway* ini sekitar 200 SMS setiap bulannya. Pada tahun 2011 terealisasi sebanyak 2.400 SMS.
12. Pembuatan Kliping Berita. Kegiatan ini berupa kumpulan berita kegiatan berbentuk kliping yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan ini secara khusus baru terealisasi pada tahun 2011 sebanyak 1.440 kliping.
13. Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjang publikasi hasil-hasil

pembangunan melalui pemaparan kebijakan pemerintah. Kegiatan ini pada tahun 2011 telah terealisasi sebanyak 60 kali paparan.

14. Komunikasi interaktif melalui media elektronik dengan capaian kinerja 60 kali pelaksanaan kegiatan.
15. Peningkatan Kualitas Sturada AM dan FM. Semenjak tahun 2009 Radio Sturada AM/FM pengelolaannya ditangani oleh Bagian Humas Setda. Pada tahun 2011 telah terealisasi sebanyak 360 kali siaran.
16. Relay Lapangan. Semenjak tahun 2009 Radio Sturada AM/FM pengelolaannya ditangani oleh Bagian Humas Setda. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan relay langsung kegiatan dari lapangan. Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 15 kali siaran.
17. Siaran Berita Pedesaan. Semenjak tahun 2009 Radio Sturada AM/FM pengelolaannya ditangani oleh Bagian Humas Setda. Kegiatan ini menginformasikan berita-berita daerah dan pedesaan, yang pada tahun 2011 terealisasi sebanyak 30 kali siaran.
18. Pengadaan alat studio dan komunikasi dengan capaian kinerja 6 buah *overhead* proyektor dan 27 unit alat studio dan komunikasi.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan di Bidang ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada Pengembangan Desa dan Kelembagaan Masyarakat Desa. Pelaksanaan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2011 diarahkan pada lima bidang prioritas yang meliputi : (1) peningkatan perekonomian masyarakat desa; (2) peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa; (3) peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa; (4) peningkatan peran serta kelembagaan masyarakat desa; (5) peningkatan pemanfaatan sumberdaya desa, sebagai wujud pelaksanaan pembangunan yang

berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat desa dan pemberdayaan pemerintahan desa.

Pada tahun 2011 pembangunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui : (1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa; (2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan; (3) Program Pembangunan Desa/Kelurahan; (4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; (5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; (6) Program Penataan Daerah Otonomi Baru. Pencapaian hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pada BPMPD pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa BPMPD Kabupaten Karawang telah melaksanakan fasilitasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

b. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Desa

Kegiatan Bulan Bhakti gotong royong masyarakat dilaksanakan selama bulan April tahun 2011 di 309 desa/kelurahan, yang penancangannya dilaksanakan oleh Bupati Karawang. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana di pedesaan melalui partisipasi swadaya murni masyarakat. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat adalah pemerintah desa bersama masyarakat di 309 desa/kelurahan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara partisipatif dengan menyerap swadaya murni sebesar Rp. 2.283.581.600,00.

c. Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan secara swakelola, dengan 70% dari anggaran tersebut diperuntukan untuk membangun sarana dan prasarana di 297 desa.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Tahun 2011, PDRB Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp 63.078.939,56 juta*, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 23.099.431,90 juta*. Mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2010 dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 57.046.690,09 juta dan PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 21.767.794, 32 juta.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhannya adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

Tabel 2.32
Peranan PDRB Kab. Karawang
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2011 (juta rupiah/persen)

No.	Lapangan Usaha	2010*)	2011*)
1.	Primer (Pertanian dan Pertambangan)	6.654.439, 80 (11,66)	7.020.679,64 (11,13)
2.	Sekunder (Industri, Listrik, Air dan Bangunan)	33.740.943,98 (59,15)	367.855.766,07 (58,43)
3.	Tersier (Perdagangan, Angkutan dan Komunikasi dan Jasa)	16.651.306,30 (29,19)	19.202.493,84 (30,44)
	PDRB	57.046.690,30 (100,00)	62.078.939,56 (100,00)

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Kontribusi sektor primer atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 11,66 persen pada tahun 2010 menjadi 11,13 persen. Begitu juga dengan sektor sekunder, dari 59,15 persen di tahun 2010 menjadi 58,43 persen pada tahun 2011. Namun sektor tersier, mengalami peningkatan dari 29,19 persen pada tahun 2010, menjadi 30,44 persen pada tahun 2011. Kontribusi sektor tersier tersebut memperlihatkan bahawa Kabupaten Karawang selain sebagai daerah berbasis

industri juga telah mulai berkembang menuju ke arah daerah berbasis perdagangan dan jasa.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi.

Tabel 2.33
Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Tahun 2010-2011
Atas Dasar Harga Berlaku (persen)

No.	Lapangan Usaha	2010*)	2011*)
1.	Pertanian	8,37	8,10
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,29	3,03
3.	Industri Pengolahan	54,12	53,25
4.	Listrik dan Air Bersih	3,14	3,13
5.	Bangunan	1,88	2,05
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	20,36	21,45
7.	Angkutan dan Komunikasi	4,81	5,04
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,16	1,15
9.	Jasa-jasa	2,86	2,80
	PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

Analisis sektor menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan tetap merupakan sektor terunggul dan terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karawang, yaitu sebesar 54,12 persen pada tahun 2010 dan 53,25 persen pada tahun 2011. Disusul kemudian oleh sektor perdagangan dan pertanian, yang masing-masing menyumbang sebesar 21,45 persen dan 8,10 persen. Sedangkan 3 sektor penyumbang terkecil dalam pembentukan PDRB 2011 adalah sektor keuangan dan jasa perusahaan, sektor bangunan dan sektor jasa-jasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro ekonomi yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga konstan. Dengan memperhatikan LPE dan sektor-sektor yang membentuk PDRB, dapat diketahui sektor atau lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cepat dalam suatu perekonomian daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Karawang tahun 2011 dengan memperhitungkan

kontribusi sektor migas diperkirakan mencapai angka 6,12* % dengan tingkat inflasi sebesar 3,21* %. (*=angka sangat sementara).

Tabel 2.34
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2011 (Persen)

No.	Lapangan Usaha	2010*)	2011*)
1.	Pertanian	2,97	2,27
2.	Pertambangan dan Penggalian	-2,58	0,82
3.	Industri Pengolahan	10,75	5,30
4.	Listrik dan Air Bersih	10,48	7,24
5.	Bangunan	9,8	11,18
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,71	9,81
7.	Angkutan dan Komunikasi	8,39	11,26
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	7,84	5,67
9.	Jasa-jasa	2,42	3,56
	PDRB DENGAN MIGAS	10,43	6,12
	PDRB TANPA MIGAS	10,95	6,44

Sumber : BPS Kabupaten Karawang
Keterangan : *) = angka sementara

LPE menurut sektor menunjukkan bahwa sektor angkutan dan komunikasi menduduki peringkat pertama dalam urutan Sembilan sektor/lapangan usaha, yang diikuti oleh sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita (*percapita income*). Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk disuatu wilayah maka tingkat kemakmuran di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto perpenduduk secara nominal, sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata perkapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB perkapita Kabupaten Karawang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari jumlah penduduk sebanyak 2.165.996 jiwa pada tahun 2011, PDRB perkapita berlaku Kabupaten Karawang sebesar Rp. 29.241.402, hal

tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 9,07 persen dibandingkan dengan PDRB perkapita di tahun 2010 yang berada pada nilai Rp. 26.810.288,00.

Kendati demikian peningkatan PDRB perkapita tersebut masih belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kabupaten Karawang secara umum, walaupun indeks daya beli menunjukkan peningkatan, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih mengandung faktor inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada tingkat menengah ke bawah.

Tabel 2.35
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2007-2011

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB	Perubahan (%)	Pendapatan perkapita ADHK	Perubahan (%)
2007	18.168.835	16,80	8.326.610	7,79
2008	20.965.082	15,39	8.065.536	8,87
2009*)	23.513.743	12,16	9.599.807	5,89
2010**)	26.810.288	14,02	10.230.231	6,57
2011**)	29.241.402	9,07	10.708.166	4,67

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka perbaikan **) = angka sementara

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pada periode tahun 2011 penangangan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu prioritas dalam penganggaran. Selain pembangunan infrastruktur jalan, bersamaan dengan itu dibangun juga infrastruktur jembatan di ruas jalan yang membutuhkan jembatan dan didalamnya termasuk pembangunan gorong-gorong/*box culvert*. Pada prinsipnya pembangunan jalan harus sebanding atau diikuti dengan jembatan pada ruas yang ditangani, karena merupakan satu kesatuan ruas jalan. Pemerintah Kabupaten Karawang juga membangun infrastruktur dalam bidang pengairan irigasi, yang di dalamnya adalah pembangunan/rehabilitasi/normalisasi sejumlah saluran dari mulai saluran sekunder, tersier dan saluran penunjang lainnya, di samping itu juga membangun

bangunan air lainnya, seperti pintu air, embung/dam mini, yang semuanya adalah untuk menunjang sistem pertanian, khususnya padi sawah yang sangat erat hubungannya dengan produktivitas petani secara menyeluruh.

Pelaksanaan pembangunan turap/talud/bronjong minimal 1.000 M' mengalami penurunan, demikian pula dengan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan minimal sepanjang 40 Km, sedangkan rehabilitasi/pemeliharaan jalan mengalami peningkatan hingga akhir tahun rencana, seperti tampak pada tabel berikut ini.

Dalam hal antisipasi dan penanggulangan kerusakan infrastruktur jalan, jembatan serta pengairan/jaringan irigasi terkait bencana alam, dilaksanakan program tanggap darurat jalan, jembatan dan pengairan. Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Karawang adalah banjir yang diakibatkan oleh luapan sungai-sungai yang melintas kota Karawang, diantaranya sungai Citarum dan Cibeet, serta curah hujan yang tinggi dan naiknya muka air laut saat air pasang terjadi. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah, perbaikan tanggul, pengadaan karung dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan pengairan yang rusak akibat banjir.

Salah satu bentuk dukungan terhadap sektor pertanian, adalah dilaksanakannya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya minimal 40,00 Km dan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya minimal 40 Km.

Kabupaten Karawang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat, sehingga perannya sangat vital bagi program ketahanan pangan nasional, kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk menjaga Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat adalah pengembangan, pengelolaan pada daerah irigasi dengan luasan dibawah 1.000 Ha

Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya diperlukan untuk menjaga kelestariannya dalam rangka menjaga fungsinya untuk

menyokong pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut sangat penting mengingat Kabupaten Karawang memiliki banyak sungai, situ serta sumber air tanah.

Perumahan merupakan salah satu aspek penting yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Karawang, yang dijabarkan sebagai berikut : Terwujudnya tata ruang yang mampu memberikan akses terhadap tumbuh dan berkembangnya aktifitas sosial ekonomi masyarakat secara memadai dan seimbang antara tata guna lahan, sistem transportasi, bangunan privat dan publik serta jaringan utilitas masyarakat. Hal tersebut kemudian diarahkan pada pembangunan kawasan permukiman dan perumahan yang lebih murah dan sebesar-besarnya melibatkan peran swasta, manajemen pengelolaan air bersih guna peningkatan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan air bersih jaringan pipa melalui pembangunan instalasi produksi dan jaringan pipa distribusi yang baru, peningkatan kemampuan jangkauan instalasi penjernihan air guna menjamin kualitas air bersih, rehabilitasi seluruh jaringan pipa distribusi untuk mengurangi kebocoran, pencegahan dan penanggulangan pencemaran terhadap sumber air baku. Pembangunan prasarana permukiman jalan lingkungan guna memberikan akses bagi penduduk setempat melakukan aktifitas sosial ekonomi dan menghubungkan pada jalan kolektor.

Iklm Berinvestasi

Investasi (Penanaman Modal) adalah pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah, dipercaya menjadi salah satu faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, banyak daerah yang berlomba-lomba membuka daerahnya dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan untuk mempermudah iklim investasi di daerahnya bagi investor yang akan masuk.

Terdapat beragam pendekatan untuk mendefinisikan investasi. Salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk mengetahui aliran modal (kapital) baik dari dalam negeri dan luar

negeri. Oleh karena itu secara umum investasi dengan fasilitas di Indonesia dapat di bedakan menjadi dua hal bergantung pada asal investornya yaitu investasi asing (penanaman modal asing/PMA) dan investasi dalam negeri (penanaman modal dalam negeri/PMDN).

Pencapaian penanaman modal PMA dan PMDN di Kabupaten Karawang berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai dengan Triwulan IV Periode bulan Januari – Desember 2011 yang direalisasikan oleh para investor menurut Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang menduduki peringkat keempat di Jawa Barat, untuk realisasi investasi PMA/PMDN, penyerapan tenaga kerja PMA/PMDN dan jumlah proyek PMA/PMDN, di bawah Kabupaten Bekasi, Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon, berarti Kabupaten Karawang turun satu peringkat bila dibandingkan dengan tahun 2010, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

- a) Total Realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Karawang pada tahun 2011 mencapai Rp. 5.332.612.866.941,00 merupakan 10,94% dari capaian Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 48.751.176.609.700,00. Jumlah LKPM sebanyak 104 merupakan 13,56% dari capaian Jawa Barat sebanyak 767 LKPM, sehingga Kabupaten Karawang menduduki peringkat ke-4 untuk total realisasi investasi PMA dan PMDN. Realisasi investasi PMA/PMDN th 2010 di Kabupaten Karawang mencapai Rp. 4.540.232.920.889,00, merupakan 9,74% dari capaian Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 46.602.615.163.159,00. Jumlah proyek PMA/PMDN sebanyak 73 buah proyek, merupakan 9,99% dari capaian Jawa Barat yaitu sebanyak 731 proyek.
- b) Total Realisasi investasi PMA di Kabupaten Karawang pada tahun 2011 mencapai Rp. 5.237.704.216.736,00 merupakan 12,69% dari capaian Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 41.445.630.518.690,00. Jumlah LKPM sebanyak 89 merupakan 14,42% dari capaian Jawa Barat sebanyak 617

LKPM, sehingga Kabupaten Karawang menduduki peringkat ke-4 untuk total realisasi investasi PMA.

- c) Total Realisasi investasi PMDN di Kabupaten Karawang pada tahun 2011 mencapai Rp. 94.908.650.205,00 merupakan 1,30% dari capaian Jawa Barat yaitu sebesar Rp. 7.305.546.091.010,00. Jumlah LKPM sebanyak 15 merupakan 10% dari capaian Jawa Barat sebanyak 150 LKPM, sehingga Kabupaten Karawang menduduki peringkat ke-8 untuk total realisasi investasi PMDN.
- d) Total penyerapan tenaga kerja PMA dan PMDN di Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebanyak 46.143 orang, yang terdiri atas 45.792 Tenaga Kerja Indonesia dan 351 Tenaga Kerja Asing, merupakan 11,63% dari capaian Jawa Barat yaitu sebanyak 396.710 orang, sehingga Kabupaten Karawang menduduki peringkat 4 untuk total penyerapan tenaga kerja PMA dan PMDN.
- e) Total penyerapan tenaga kerja PMA di Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebanyak 24.852 orang, yang terdiri atas 24.634 Tenaga Kerja Indonesia dan 218 Tenaga Kerja Asing, merupakan 8,85% dari capaian Jawa Barat yaitu sebanyak 280.713 orang, sehingga Kabupaten Karawang menduduki peringkat 3 untuk total penyerapan tenaga kerja PMA.
- f) Total penyerapan tenaga kerja PMDN di Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebanyak 21.291 orang, yang terdiri atas 21.158 Tenaga Kerja Indonesia dan 133 Tenaga Kerja Asing, merupakan 18,35% dari capaian Jawa Barat yaitu sebanyak 115.997 orang, sehingga Kabupaten Karawang menduduki peringkat 2 untuk total penyerapan tenaga kerja PMDN.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan serta Realisasi RPJMD Tahun 2011-2015

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.41
Laporan Kinerja Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2011 Triwulan IV

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
1	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	23	308,395,341,000.00	195,435,394,450.00	63,37	63,37
2	Program Pendidikan Menengah	9	526,500,000.00	517,076,000.00	98,21	98,21
3	Program Pendidikan Non Formal	7	857,135,000.00	832,046,600.00	97	97
4	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1	241,500,000.00	240,900,000.00	99,75	99,75
5	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3	179,500,000.00	179,500,000.00	100	100
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	4	114,000,000.00	114,000,000.00	100	100
7	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	200,000,000.00	0	0	0
8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3	6,435,111,000.00	6,372,424,940.00	99,02	99,02
9	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	14	1,300,722,000.00	1,238,782,000.00	94,84	94,84
10	Program Pengawasan Obat dan Makanan	4	91,912,500.00	91,912,500.00	100	100
11	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	7	6,078,075,263.00	3,673,437,550.00	60,43	60,43
12	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	4	1,009,126,900.00	994,580,900.00	98,55	98,55
13	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2	343,222,000.00	343,222,000.00	100	100
14	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6	1,729,825,000.00	1,609,529,450.00	93,04	93,04
15	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2	87,225,000.00	87,225,000.00	100	100
16	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	4	31,303,203,900.00	31,300,256,163.00	99,99	99,99
17	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	7	6,004,026,700.00	5,231,443,559.00	87,13	87,13
18	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1	56,505,000.00	56,505,000.00	100	100

19	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	5	256,200,000.00	256,050,000.00	99,94	99,94
20	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	77,175,000.00	77,175,000.00	100	100
21	Program Peningkatan Manajemen Kesehatan	2	201,395,000.00	195,520,000.00	97,08	97,08
22	Program Surveillace Epidemiologi,Imunisasi dan Kesehatan Matra	5	1,039,286,050.00	1,006,021,050.00	96,79	96,79
23	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	12	54,855,010,000.00	44,407,839,083.00	80,95	80,95
24	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	5	4,511,373,000.00	2,052,751,071.00	45,50	45,50
25	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	7	1,047,836,150.00	803,956,650.00	76,72	76,72
26	Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	7	1,044,787,100.00	567,421,000.00	54,31	54,31
27	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8	20,823,255,600.00	11,735,843,045.00	56,32	56,32
28	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	4	163,721,250.00	130,591,700.00	79,76	79,76
29	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	1	0	0	0	0
30	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	26	5,598,702,685.00	3,301,105,675.00	58,96	58,96

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
31	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	20	3,204,328,400.00	2,559,860,300.00	79,88	79,88
32	Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan	245	97,062,784,500.00	58,340,062,325.00	60,10	60,10
33	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	11	6548231950	6164874100	94,14	94,14
34	Program Perencanaan Tata Ruang	7	1,384,450,000.00	1,189,714,600.00	85,93	85,93
35	Program Lingkungan Sehat Perumahan	12	18,986,398,900.00	9,790,834,210.00	51,56	51,56
36	Program Pemanfaatan Ruang	8	3,762,023,250.00	2,959,176,800.00	78,65	78,65
37	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	5	2,470,000,000.00	1,793,235,000.00	72,60	72,60
38	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	3	886,340,000.00	589,775,275.00	66,54	66,54
39	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum	10	40,135,984,000.00	21,739,299,600.00	54,16	54,16
40	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	75,000,000.00	74,786,000.00	99,71	99,71
41	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	9	1,343,750,000.00	1,130,969,000.00	83,98	83,98

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
42	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	7	1,423,654,000.00	1,355,895,500.00	95,24	95,24
43	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	5	842,000,000.00	777,881,000.00	92,38	92,38
44	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	7	1,143,400,000.00	944,490,500.00	82,60	82,60
45	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	9	1,175,968,250.00	675,375,000.00	57,43	57,43
46	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ	2	205,010,000.00	202,668,750.00	98,86	98,86
47	Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Massa	9	335,000,000.00	335,000,000.00	100	100
48	Program peningkatan pelayanan angkutan	1	45,700,000.00	44,918,000.00	98,29	98,29
49	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	25,400,000.00	25,400,000.00	100	100
50	Program Pengendalian dan pengamanan Lalu lintas	6	941,097,500.00	937,837,500.00	99,65	99,65
51	Program Transportasi Darat	1	263,350,000.00	259,087,000.00	98,38	98,38
52	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	10	625,000,000.00	587,832,000.00	94,05	94,05

53	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1	30,000,000.00	30,000,000.00	100	100
54	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	4	191,200,000.00	188,650,000.00	98,67	98,67
55	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	2	100,000,000.00	99,797,000.00	99,79	99,79
56	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2	249,000,000.00	248,086,100.00	99,63	99,63
57	Program Penataan Administrasi Kependudukan	14	7,637,146,500.00	4,450,661,241.00	58,28	58,28
58	Program Catatan Sipil	4	702,700,000.00	673,373,650.00	95,83	95,83
59	Program Keluarga Berencana	8	2,168,513,650.00	2,074,165,400.00	95,65	95,65
60	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	2	83,160,000.00	82,935,000.00	99,73	99,73
61	Program Pelayanan Kontrasepsi	1	20,884,000.00	20,884,000.00	100	100
62	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	2	131,293,550.00	131,293,550.00	100	100
63	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	3	175,055,000.00	173,155,000.00	98,91	98,91
64	Program Peningkatan Kualitas Data Dan Jaringan	2	194,673,000.00	194,545,000.00	99,93	99,93

	Informasi					
65	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	11	603,900,000.00	520,929,750.00	86,26	86,26
65	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	2	50,000,000.00	50,000,000.00	100	100
66	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	6	193,000,000.00	142,265,000.00	73,71	73,71
67	Program Peningkatan Pelayanan Sosial	11	1,929,500,000.00	951,693,100.00	49,32	49,32
68	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	6	935,033,000.00	930,645,400.00	99,53	99,53
69	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	6	592,600,000.00	591,920,600.00	99,88	99,88
70	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	8	865,000,800.00	857,800,800.00	99,17	99,17
71	Program Transmigrasi Regional	3	445,338,000.00	415,753,000.00	93,35	93,35

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
72	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	3	94,140,000.00	93,300,000.00	99,11	99,11
73	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	5	155,000,000.00	150,622,500.00	97,17	97,17
74	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	5	278,000,000.00	263,291,000.00	94,70	94,70
75	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	8	266,729,950.00	260,969,950.00	97,84	97,84
76	Program Pengembangan Nilai Budaya	18	3,587,650,000.00	3,531,465,000.00	98,43	98,43
77	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Budaya	8	1,710,000,000.00	1,705,840,000.00	99,75	99,75
78	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	7	6,668,203,000.00	1,957,441,350.00	29,35	29,35
79	Program Pengembangan Sarana Wisata	1	50,582,700.00	0	0	0
80	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	6	328,000,000.00	213,945,000.00	65,22	65,22

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
81	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	6	2,847,490,000.00	2,361,459,960.00	82,93	82,93
82	Program Pendidikan Politik Masyarakat	3	238,500,000.00	193,991,120.00	81,33	81,33
83	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	4	466,624,000.00	218,773,000.00	46,88	46,88
84	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	3	3,257,750,000.00	3,069,495,000.00	94,22	94,22
85	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	6	1,831,142,500.00	1,709,024,700.00	93,33	93,33
86	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1	85,000,000.00	80,250,000.00	94,41	94,41
87	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	1	106,647,500.00	50,977,500.00	47,80	47,80
88	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	3	680,000,000.00	676,485,000.00	99,48	99,48
89	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1	30,000,000.00	30,000,000.00	100	100
90	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	5	2,200,000,000.00	1,704,353,000.00	77,47	77,47

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
91	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	6	13,461,230,460.00	5607746350	41,65	41,65
92	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	8	680,000,000.00	430,550,000.00	63,32	63,32
93	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	5	374,590,000.00	203,000,000.00	54,19	54,19
94	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	5	2,589,850,000.00	1,661,279,000.00	64,15	64,15
95	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	17	3,167,828,000.00	2,433,058,600.00	76,80	76,80
96	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	7	1,135,000,000.00	1,083,932,500.00	95,50	95,50
97	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1	30,000,000.00	30,000,000.00	100	100
98	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	12	1,574,356,000.00	1,187,991,000.00	75,46	75,46
99	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	2	175,000,000.00	0	0	0
100	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5	1,308,000,000.00	1,257,578,000.00	96,14	96,14
101	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	4	600,000,000.00	507,000,000.00	84,5	84,5
102	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	17	1,505,000,000.00	1,305,000,000.00	86,71	86,71
103	Program Pengkajian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan	5	700,000,000.00	662,704,700.00	94,67	94,67
104	Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan	2	250,000,000.00	250,000,000.00	100	100

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
105	Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan	8	950,000,000.00	569,580,000.00	59,95	59,95
106	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	15	17,061,847,500.00	13,295,642,900.00	77,93	77,93
107	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	6	1,613,012,500.00	1,562,632,700.00	96,87	96,87
108	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	2	1,015,400,000.00	941,180,250.00	92,69	92,69
109	Program Pendidikan Kedinasan	2	68,033,900.00	57,968,900.00	85,20	85,20
110	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	21	8,270,994,375.00	4,739,426,650.00	57,30	57,30
114	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1	80,000,000.00	67,986,400.00	84,98	84,98
115	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	7	400,000,000.00	387,055,500.00	96,76	96,76
116	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2	75,000,000.00	75,000,000.00	100	100
117	Program Pembangunan Desa/ Kelurahan	9	2,525,000,000.00	2,134,262,600.00	84,52	84,52
118	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	5	187,405,000.00	186,744,900.00	99,64	99,64

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
119	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	3	179,255,000.00	178,554,500.00	99,60	99,60
120	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	2	120,000,000.00	119,999,950.00	99,99	99,99
121	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	11	814,565,000.00	657,289,000.00	80,69	80,69
122	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	10	490,000,000.00	473,850,000.00	97	97
123	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	15	2,225,000,000.00	2,099,594,525.00	94	94
124	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	5	405,000,000.00	379,914,430.00	94	94
125	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	2	150,000,000.00	147,846,500.00	99	99
126	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1	50,000,000.00	50,000,000.00	100	100
127	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	6	370,000,000.00	339,355,000.00	92	92
128	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	2	230,000,000.00	226,731,000.00	99	99
129	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	2	598,000,000.00	592,945,000.00	99	99
130	Program Pengembangan Agribisnis	7	490,000,000.00	135,980,000.00	28	28
131	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan	17	2,451,984,200.00	84,215,500.00	34	34
132	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	2	105,000,000.00	103,907,500.00	98,95	98,95
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	4	623,755,000.00	603,298,550.00	96,72	96,72

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
134	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	7	1,917,679,050.00	1,524,005,550.00	79,47	79,47
135	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	4	240,000,000.00	230,904,200.00	96,21	96,21
136	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	8	2,432,023,050.00	1,863,756,400.00	76,63	76,63
137	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	2	137,000,000.00	114,561,500.00	83,62	83,62
138	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	8	538,080,000.00	440,001,350.00	81,77	81,77
139	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	12	663,350,000.00	654,698,600.00	98,69	98,69
140	Program peningkatan sistem informasi perikanan, kelautan dan peternakan	1	30,000,000.00	30,000,000.00	100	100
141	Program Perlindungan Konsumen dan Pngamanan Perdagangan	18	1,735,575,000.00	1,530,515,000.00	88,18	88,18
142	Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar	14	1,167,410,900.00	1,152,667,500.00	98,73	98,73
143	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	2	1,357,325,000.00	1,314,297,000.00	96,82	96,82
144	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	5	230,000,000.00	230,000,000.00	100	100
145	Program Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Daerah	9	415,000,000.00	414,750,000.00	99,93	99,93

No	Program	Jumlah Kegiatan	Belanja			
			Anggaran	Realisasi		
				Keuangan	%	Fisik (%)
146	Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan asongan	2	110,000,000.00	109,650,000.00	99,68	99,68
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	41	122.687.000,00	318.787.000,00	38	38
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	55	675.711.850,00	670.336.375,00	100	100
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	73	762.538.100,00	752.667.800,00	100	100
	Program Peningkatan Peran Setra dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	32	242.319.650,00	240.794.650,00	100	100
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	2	3.000.000,00	1.500.000,00	50	50
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	38	257.725.400,00	257.721.400,00	100	100
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2	19.945.000,00	19.943.650,00	100	100
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	1	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1	5.000.000,00	5.000.000,00	100	100
	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2	10.000.000,00	10.000.000,00	100	100
	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1	12.500.000,00	12.500.000,00	100	100

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Karawang cukup baik dengan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten Karawang ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi global dan nasional dimana Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator, dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran lima hingga enam persen per tahun, kecuali mengalami penurunan pada 2009, saat terkena imbas oleh krisis finansial. Pertumbuhan ekonomi yang stabil menggambarkan kecenderungan yang stabil dalam peningkatan belanja masyarakat. Keadaan ini mengindikasikan pasar yang kondusif.

Iklim pasar yang positif juga didukung oleh besarnya Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam tataran teknis, PDB adalah proksi dari laba operasi dunia usaha), yaitu sekitar Rp 6.300 triliun (2010) yang diperkirakan naik menjadi sekitar Rp 7.000 triliun (2011). Kegiatan ekonomi ini ditunjang pengendalian inflasi. Meski pengaruh kenaikan harga bahan bakar internasional jelas terlihat, seperti pada 2005 dan 2008, namun inflasi masih dapat terkendali pada tahun berikutnya, yaitu di bawah dua digit.

Pengendalian inflasi mendorong kestabilan pada nilai tukar dan suku bunga. Nilai tukar bergerak dalam kisaran Rp 8.900-9.000 per dolar AS, kecuali pada saat *shock* finansial(2008). Demikian pula rujukan suku bunga, BI Rate, yang bertengger pada 6.5 % dalam tiga tahun terakhir.

Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan membaik menjadi 4,1% setelah sebelumnya melambat dari 3,9% di tahun 2011 menjadi 3,5% ditahun 2012 (WEO Apr'12, IMF). Maret 2012, Pemerintah China merevisi proyeksi pertumbuhannya dari 8,0% menjadi 7,5% , sementara India dari 7,5% menjadi 6,9%.

Perlambatan ekonomi dan revisi perkiraan pertumbuhan didorong oleh terjadinya perlambatan di sektor perdagangan

internasional. Di tahun 2012, hampir seluruh negara berkembang Asia mengalami perlambatan ekspor, akibat melemahnya permintaan dari negara maju khususnya kawasan eropa. Ekspor Indonesia pada tahun 2012 diperkirakan akan melambat dari 27,5% (yoy) menjadi 13,5% (yoy).

Target Pertumbuhan PDB tahun 2012 sebesar 6,5%

Kontribusi ekspor netto menurun akibat perlambatan ekspor

Kontribusi investasi meningkat:

- Perbaikan iklim investasi
- Program MP3EI

Konsumsi RT masih cukup baik

- Kompensasi bila terjadi Kenaikan BBM

Sektor industri pengolahan, perdagangan dan transportasi masih menjadikontributor pertumbuhan terbesar

Perkiraan Inflasi 2012

Berdasarkan perkembangan terkini, perkiraan baseline inflasi menurun dari 4,33% (RAPBN-P2012) menjadi 4,13%.

Kenaikan HPP beras pada skenario terjadinya kenaikan BBM bersubsidi lebih besar, akibat dampak lanjutan (*2nd round effect*) dari harga BBM Skenario Pembatasan BBM bersubsidi diperkirakan tetap membawa dampak pada kenaikan biaya transportasi

Ekspektasi inflasi telah meningkat di awal tahun seiring rencana kenaikan harga BBM, penundaan penyesuaian harga BBM bersubsidi dapat dorong inflasi lebih tinggi.

Melihat factor-faktor diatas, Kondisi perekonomian Kabupaten Karawang pada tahun 2013 diharapkan tetap dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan tahun 2013 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari rencana Pemerintah Pusat untuk melakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak, serta peningkatan harga pangan akibat krisis di Timur Tengah dan perubahan iklim. PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2013 diperkirakan dapat mencapai Rp. 23,099,429,00 dan PDRB per kapita

atas dasar harga konstan diharapkan sebesar Rp. 10,708,164,00. Laju pertumbuhan ekonomi **migas** dapat tumbuh sebesar 5,62 % dengan tingkat inflasi 2,21 %. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro di Kabupaten Karawang diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumberdaya manusia. Sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang tidak hanya terjadi pada peningkatan konsumsi melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Dimana hal tersebut dapat menjawab kendala pembangunan ekonomi yaitu tingkat pengangguran yang masih tinggi serta membuka peluang kesempatan kerja dan berusaha bagi kelompok masyarakat usia produktif. Kondisi Ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun 2009-2010 dan prediksi 2011-2012 dapat dilihat dari beberapa indikator makro sebagai berikut:

Tabel 3.1
Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karawang

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi	
			2010**	2011**
1	PDRB (Harga Berlaku)*	juta rupiah	57.046.690,09	63.078.939,56
2	PDRB (Harga Konstan)*	juta rupiah	21.767.794, 32	23.099.431,90
3	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	%	10,43*	6,12*
4	Tingkat Inflasi*	%	7,73*	3,21*
5	Jumlah Penduduk	orang	2.124.565*	2.165.996
6	Jumlah Penduduk Miskin**	%	12,21	13,06
7	Tingkat Pengangguran **	%	3,8	10
8	PDRB per kapita atas dasar HK*	Rp	10.230.231	10.708.166
9	PDRB per kapita atas dasar HB*	Rp	26.810.288	29.241.402
10	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HK)*	juta rupiah	21.767.794	23.099.431
11	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HB)*	juta rupiah	57.046.690	63.078.939

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi

Berdasarkan latar belakang kondisi ekonomi Kabupaten Karawang pada tahun-tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan kondisi umum perekonomian Nasional dan regional Jawa Barat, ekonomi daerah Kabupaten Karawang tahun 2013 dalam konteks makro regional diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prediksi perekonomian tahun 2013 diharapkan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun mungkin akan sedikit melambat pada awal tahun, akibat kenaikan harga barang yang terjadi sebagai dampak dari rencana pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan roda pribadi roda empat di atas 1500cc. Hal tersebut tentu saja akan berpengaruh langsung terhadap perekonomian makro secara nasional. Kenaikan harga barang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan dan juga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu sehingga pada tahun 2013 diperlukan berbagai upaya untuk dapat meredam dampak yang diperkirakan akan terjadi tersebut.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Karawang dan melihat prospek perekonomian tahun 2013 maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Karawang adalah:

1. Meningkatkan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
2. Meningkatkan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing;
3. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan ketahanan pangan daerah;
4. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Meningkatkan investasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Karawang Tahun 2013 adalah :

Tabel 3.2

Prediksi Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karawang

No	Indikator Makro	Satuan	Proyeksi 2013
1	PDRB (Harga Berlaku)*	juta rupiah	63,078,937.00**
2	PDRB (Harga Konstan)*	juta rupiah	23,099,429.00**
3	Pertumbuhan Ekonomi (Tanpa Migas)	%	5,62**
4	Tingkat Inflasi*	%	2,21**
5	Jumlah Penduduk	orang	2,382,595
6	Jumlah Penduduk Miskin**	%	13,00**
7	Tingkat Pengangguran **	%	9**
8	PDRB per kapita atas dasar HK*	Rp	10,708,164.00**
9	PDRB per kapita atas dasar HB*	Rp	29,241,400.00**
10	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HK)*	juta rupiah	63,078,937.00**
11	Produk Domestik Regional Netto atas dasar Biaya Faktor/Pendapatan Regional (HB)*	juta rupiah	23,099,429.00**

Sumber : BPS Kabupaten Karawang

Keterangan : *) = angka revisi; **) = angka estimasi

Prioritas kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2013 difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui ;

1. Peningkatan kesejahteraan social melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta perwujudan kehidupan social yang religious dan harmonis;
2. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industry, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata;

3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar infrastruktur dan pembangunan pedesaan;
4. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tata ruang;
5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab.:

Berdasarkan prioritas di atas, kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Karawang adalah Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industry, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata. Oleh karena itu target pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2013 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Target Kinerja di Bidang Ekonomi Tahun 2013 Kabupaten Karawang

No	Indikator Kinerja Tematik	Kondisi Awal 2011	Target 2013
1	Pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis)	38.396,07 Ton Ikan	4,031,587.35 Ton Ikan
2	Pengembangan IKM	3.450 UKM	3.850 UKM
3	Pengembangan Pasar	29 Unit Pasar Tradisional dan Penunjang	29 Unit Pasar Tradisional dan Penunjang
4	Penguatan kapasitas usaha KUMKM	226 UKM	300 UKM
5	Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah	PAD Kepariwisata Rp. 189.455.000,00	PAD Kepariwisata Rp. 189.455.000,00
6	Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW)	31 ODTW	35 ODTW

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2013 pada dasarnya adalah menerapkan konsep penguatan dan keberlanjutan dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun pertama RPJMD (2011 dan 2012) dengan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk terus berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat

dipertanggungjawabkan. kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 yang baru saja dikeluarkan dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

Adapun optimalisasi pendapatan daerah melalui :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
 - a. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Pendekatan ekstensifikasi untuk perluasan basis pajak serta intensifikasi dalam bentuk perubahan regulasi guna peningkatan basis pajak tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
 - c. Peningkatan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak . Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan

dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

- d. Perbaiki kinerja dan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif dalam rangka peningkatan kontribusi laba terhadap pendapatan asli daerah
 - e. Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan pemungutannya
 - f. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD
 - g. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari deviden BUMD sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - h. Upaya peningkatan PAD juga harus dilakukan dengan memperhatikan aspek biaya – manfaat yang dihasilkan, yaitu harus memperhitungkan rasio tingkat biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, oleh sebab itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah oleh SKPD yang berkompeten harus dilakukan secara akuntabel.
 - i. Kebijakan lain terkait peningkatan pendapatan asli daerah yang akan dilaksanakan adalah pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang *idle* baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Konsep *revenue sharing* atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Karawang dalam :
- a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Propinsi.
 - b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
3. Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan

DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah. Berdasarkan kebijakan DAK, terdapat beberapa bidang yang memiliki potensi memperoleh alokasi DAK meliputi : (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Keluarga Berencana; (4) Infrastruktur Jalan; (5) Infrastruktur Irigasi; (6) Infrastruktur Air Minum; (7) Infrastruktur Sanitasi; (8) Prasarana Pemerintahan Daerah; (9) Kelautan dan Perikanan; (10) Pertanian; (11) Lingkungan Hidup; (12) Kehutanan; (13) Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal; (14) Sarana Perdagangan; (15) Transportasi Perdesaan; (16) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan; (17) Listrik Perdesaan; (18) Perumahan dan Permukiman; serta (19) Keselamatan Transportasi Darat.

4. Kebijakan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan amanat dari UU Nomor 35 Tahun 2008, yang dialokasikan antara lain untuk dana penyesuaian berupa dana tambahan penghasilan guru PNSD, Dana Insentif Daerah, dana tambahan untuk tunjangan profesi guru (TPG), dan bantuan operasional sekolah (BOS). Dana Insentif Daerah terutama ditujukan kepada daerah berprestasi yang memiliki kriteria keuangan dan kriteria kinerja ekonomi dan kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, dana tambahan untuk TPG sejalan dengan telah ditetapkan PP Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, yang dialokasikan mulai tahun 2010. Dana tersebut diberikan kepada guru dan dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan belanja daerah pada APBD-P 2013 diarahkan pada :

1. Pengalokasian belanja pegawai
2. Belanja Hibah
3. Belanja bantuan sosial
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

6. Belanja Tidak Terduga

3.2.2. REKAPITULASI REALISASI DAN PROYEKSI (PAGU INDIKATIF) KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Asumsi yang digunakan untuk memprediksi APBD Perubahan Kabupaten Karawang 2013 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah

Adanya pengalihan PBB Perkotaan dan Perdesaan menjadi Pajak Daerah. (Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah);

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah (Retribusi);

Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana bagi hasil tidak berkurang.

3. Belanja Daerah

Pagu belanja ditetapkan sesuai pagu belanja pada APBD Murni tahun 2013, dengan peningkatan pagu pada kegiatan-kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dan bersifat reposisi serta tidak adanya pengeluaran untuk pendanaan keadaan darurat dan luar biasa. Berdasarkan asumsi di atas, Pendapatan dan Belanja pada APBD Perubahan Tahun 2013 diprediksikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Rencana dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang
Tahun 2012-2013

NO	URAIAN	PERDA APBD MURNI TA 2013	REPERDA PERUBAHAN APBD	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	PENDAPATAN DAERAH	2.353.841.086.857,00	2.514.368.341.009,00	160.527.254.152,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	479.943.817.140,00	534.540.965.677,00	54.597.148.537,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	307.835.394.292,00	350.315.700.000,00	42.480.305.708,00
1.1.2	Retribusi Daerah	53.430.168.580,00	52.913.018.580,00	(517.150.000,00)

1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.118.279.406,00	5.673.576.689,00	555.297.283,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	113.559.974.862,00	125.638.670.408,00	12.078.695.546,00
1.2	Dana Perimbangan	1.488.992.466.180,00	1.494.906.258.075,00	5.913.791.895,00
1.2.1	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	248.922.046.180,00	254.835.838.075,00	5.913.791.895,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.134.530.200.000,00	1.134.530.200.000,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	105.540.220.000,00	105.540.220.000,00	0,00
1.3	Lain-lain pendapatan yang sah	384.904.803.537,00	484.921.117.257,00	100.016.313.720,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.879.475.000,00	2.879.475.000,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	161.310.080.537,00	161.310.080.537,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	164.132.014.000,00	257.414.082.120,00	93.282.068.120,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	55.463.234.000,00	62.197.479.600,00	6.734.245.600,00
1.3.6	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi.	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
2	BELANJA DAERAH	2.778.186.807.645,00	3.018.481.548.155,00	240.294.740.510,00
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.267.906.434.380,00	1.380.284.380.250,00	112.377.945.870,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.035.809.350.150,00	1.131.567.915.020,00	95.758.564.870,00
2.1.2	Belanja Hibah	95.307.000.000,00	95.307.000.000,00	0,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	15.815.000.000,00	20.434.381.000,00	4.619.381.000,00
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa	43.548.013.550,00	43.548.013.550,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa dan Partai Politik	69.927.070.680,00	81.927.070.680,00	12.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Tak Terduga	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	1.510.280.373.265,00	1.638.197.167.905,00	127.916.794.640,00
2.2.1	Belanja Pegawai	249.248.175.318,00		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	600.784.563.835,00		
2.2.3	Belanja Modal	660.247.634.112,00		
	Surplus /(Defisit)	(424.345.720.788,00)	(504.113.207.146,00)	(79.767.486.358,00)
3	Pembiayaan Daerah	424.345.720.788,00	495.169.420.146,00	70.823.699.358,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	429.345.720.788,00	500.169.420.146,00	70.823.699.358,00
3.1.1	Silpa Tahun Anggaran sebelumnya	429.345.720.788,00	500.169.420.146,00	70.823.699.358,00
3.1.2	Pemberian Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00

3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
3.3	PEMBIAYAAN NETTO	424.345.720.788,00	495.169.420.146,00	70.823.699.358,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	(8.943.787.000,00)	(8.943.787.000,00)

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang ini memperhatikan misi Bupati/Wakil Bupati Karawang terutama Kebijakan pembangunan yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran misi Bupati Karawang periode 2010-2015. Kebijakan pembangunan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tahun 2011 - 2015.

- 1) **Misi 1** : Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang cerdas, sehat, berbudaya dan religius yang harmonis, dengan kebijakan :
 - a. Bidang Pendidikan
 - (1) Mengalokasikan anggaran untuk meringankan beban biaya pendidikan;
 - (2) Peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik;
 - (3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar;
 - (4) Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah;
 - (5) Penguatan dan pelaksanaan regulasi, pranata serta norma standar pedoman dan ketentuan (NSPK) bidang pendidikan;
 - (6) Penguatan kelembagaan dan manajemen sumberdaya manusia;
 - (7) Penguatan fungsi perencanaan, evaluasi dan pengendalian program kerja penyelenggaraan pendidikan yang berbasis data dan informasi;
 - (8) Pembangunan Institut Kelautan dan Perikanan Nasional (IKPN).
 - b. Bidang Perpustakaan
 - (1) Pengembangan layanan perpustakaan.
 - c. Bidang Kesehatan
 - (1) Pengembangan desa siaga menuju desa sehat;

- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan asuransi semesta (*Universal Coverage*);
 - (3) Penurunan resiko kematian ibu, bayi dan balita;
 - (4) Pelayanan vaksinasi dasar lengkap;
 - (5) Mewujudkan sistem surveillans dan monitoring;
 - (6) Pengadaan dan pemerataan obat serta perbekalan kesehatan;
 - (7) Menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih;
 - (8) Penanggulangan gizi kurang;
 - (9) Peningkatan sarana kesehatan yang terstandar dan terakreditasi;
 - (10) Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan;
 - (11) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- d. Bidang Keluarga Berencana
- (1) Penyediaan pelayanan, penyuluhan dan advokasi kesehatan reproduksi.
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- (1) Meningkatkan upaya-upaya pemberdayaan perempuan;
 - (2) Penyediaan pelayanan rehabilitasi, penyuluhan dan advokasi terhadap tindak kekerasan dan *trafficking*.
- f. Bidang Sosial
- (1) Meningkatkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) penerima manfaat;
 - (2) Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- g. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
- (1) Pembinaan kelembagaan kepemudaan;
 - (2) Pengembangan prestasi atlet daerah dan pembangunan sarana olahraga;
 - (3) Peningkatan prestasi olahraga.
- h. Bidang Kebudayaan
- (1) Pengembangan kapasitas pelaku budaya;
 - (2) Pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal;
 - (3) Pelestarian situs sejarah dan budaya.

- i. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan
 - (1) Pembinaan kehidupan antar dan inter umat beragama;
 - (2) Fasilitasi dan pembinaan aktifitas kehidupan keagamaan.
- 2) **Misi 2** : Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah, dengan kebijakan :
 - a. Bidang Pertanian
 - (1) Pengembangan usaha-usaha agribisnis pertanian komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui penyediaan sarana dan prasana produksi, pemberdayaan kelembagaan, penerapan inovasi dan teknologi pertanian, pengembangan industri pengolah hasil pertanian;
 - (2) Pengembangan sistem dan sumberdaya penyuluh pertanian;
 - (3) Pengembangan sektor peternakan diarahkan pada peningkatan skala usaha melalui rintisan pola agribisnis, fasilitasi desain produk, penanganan produksi dan pengendalian penyakit ternak;
 - (4) Rintisan pengembangan *one village one product* sektor pertanian;
 - (5) Pembangunan terminal agribisnis daerah.
 - b. Bidang Kelautan dan Perikanan
 - (1) Pengembangan sentra-sentra produksi perikanan menuju pengembangan kawasan minapolitan;
 - (2) Pembangunan rumah potong hewan berbasis tata ruang.
 - c. Bidang Industri
 - (1) Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha bagi masuknya investasi sektor industri;
 - (2) Pengembangan industri kecil dan menengah yang mampu memanfaatkan posisi dalam rantai nilai industri dan potensi sumberdaya lokal melalui pengembangan sentra IKM, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan IKM.
 - d. Bidang Perdagangan
 - (1) Pengembangan regulasi, fasilitasi dan iklim usaha serta sarana prasarana perdagangan dalam mendukung sistem distribusi barang produksi dan konsumsi;

- (2) Pengembangan kerjasama perdagangan dalam rangka mendukung promosi produk unggulan daerah.
- e. Bidang Pariwisata
- (1) Penyediaan fasilitasi, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah;
 - (2) Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW);
 - (3) Pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha serta kemitraan sektor pariwisata daerah.
- f. Bidang Ketenagakerjaan
- (1) Peningkatan kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja;
 - (2) Penyediaan informasi ketenagakerjaan;
 - (3) Pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengawasan regulasi bidang ketenagakerjaan.
- g. Bidang Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- (1) Meningkatkan kemampuan kewirausahaan UMKM dan sistem kelembagaan koperasi;
 - (2) Meningkatkan skala usaha KUMKM melalui fasilitasi pembiayaan, pengembangan kerjasama, promosi dan akses pasar, pengembangan inovasi dan teknologi serta standarisasi desain produk;
 - (3) Membangun dan meningkatkan lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil yang proporsional. Strategi yang direncanakan adalah membangun lembaga-lembaga ekonomi mikro dan menengah dengan sistem bagi hasil.
- 3) **Misi 3** : Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah, dengan kebijakan :
- a. Bidang Tata Ruang
- (1) Melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi daerah, standar dan pedoman bidang penataan ruang;
 - (2) Meningkatkan koordinasi dan pemantapan keterpaduan pemanfaatan serta pengendalian ruang wilayah yang selaras dengan pola dan struktur ruang wilayah;

- (3) Menetapkan kawasan rawan bencana dan mengembangkan sistem penanganan bencana;
 - (4) Jalan antar kawasan.
- b. Bidang Pekerjaan Umum
- (1) Mengembangkan ruas jalan kolektor primer penghubung antar pusat kegiatan (PKW - PKL dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten diarahkan pada :
 - a) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 7 m, bahu jalan 1,5 m, drainase 1 m);
 - b) Meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi dan nasional;
 - c) Membangun ruas jalan baru yang mendukung pengembangan wilayah, sesuai ketentuan teknis, kelas dan fungsi jalan yang direncanakan;
 - d) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih dibawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimum (6 m dengan memperhatikan kondisi lokasi).
 - (2) Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten :
 - a) Meningkatkan kualitas konstruksi jalan sesuai dengan kelas dan fungsi jalan (persyaratan lebar minimal perkerasan 4 m, bahu jalan 1 m, drainase 1 m);
 - b) Meningkatkan segmen jalan lintas yang masih di bawah standar untuk memenuhi persyaratan lebar minimal (4 m dengan memperhatikan faktor lokasi).
 - (3) Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa, diarahkan pada peningkatan kemantapan struktur konstruksi jalan *rigid/hotmix* (persyaratan lebar minimal perkerasan 3,5 m, bahu jalan 0,75 m, drainase 0,5 m);
 - (4) Mempertahankan kondisi konstruksi jembatan sesuai rencana umur teknis yang telah ditetapkan;

- a) Membangun jembatan penghubung pada lokasi strategis;
 - b) Optimalisasi manajemen pemeliharaan konstruksi jembatan.
- (5) Meningkatkan koordinasi pemanfaatan, efisiensi penyaluran, pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas aliran;
 - (6) Meningkatkan upaya-upaya konservasi sumberdaya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai;
 - (7) Mengembangkan sistem prasarana pengendalian banjir dan penanganan abrasi pantai;
 - (8) Kajian data teknis jalan, jembatan dan pengairan;
 - (9) Mengembangkan pelayanan jaringan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah rawan air bersih;
 - (10) Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan air bersih;
 - (11) Mengembangkan kebijakan pengolahan air limbah secara partisipatif;
 - (12) Mengembangkan sistem regulasi, manajemen dan sarana prasarana pelayanan persampahan;
 - (13) Pengembangan kebijakan dan penataan lingkungan kumuh pemukiman;
 - (14) Penataan taman kota dengan memperhatikan aspek estetika, fungsi dan nilai arsitektural;
 - (15) Penyediaan lapangan olahraga masyarakat di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - (16) Penataan bangunan publik yang memiliki nilai historis, religi dan fungsi sosial lainnya;
 - (17) Menyediakan instrumen kebijakan, mekanisme dan fasilitasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang terjangkau baik melalui mekanisme pasar maupun mekanisme yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat;

(18) Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan saluran irigasi berbasis partisipasi masyarakat.

c. Bidang Perhubungan

- (1) Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi;
- (2) Mengembangkan kebijakan sistem jaringan transportasi daerah;
- (3) Penegakan hukum dan disiplin lalu lintas, angkutan dan jalan.

4) **Misi 4** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan kebijakan :

a. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan manajemen kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM aparatur;
- (2) Pengembangan kebijakan, penataan struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sistem prosedur kerja berbasis Teknologi Informasi (TI);
- (3) Pengembangan kebijakan dan pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah;
- (4) Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah yang akuntabel;
- (5) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana aparatur sesuai kebutuhan dan standarisasi yang ditetapkan;
- (6) Pengembangan kebijakan dan pengelolaan barang milik daerah;
- (7) Pengembangan kebijakan penanaman modal dan pelayan perizinan;
- (8) Melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan secara komprehensif serta penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh OPD;
- (9) Peningkatan kapasitas legislatif;
- (10) Fasilitasi peningkatan peran dan fungsi parpol serta orsos/ormas.

- b. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
 - (1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan
 - (1) Pengembangan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data;
 - (2) Pembuatan *master plan* sistem penyediaan air minum se-Kabupaten Karawang;
 - (3) Pembuatan *master plan* pembangunan jalan-jalan di Kabupaten Karawang dari jalan-jalan batang-cabang dan jalan-jalan ranting;
 - (4) Pembuatan *master plan* pembangunan dan perbaikan saluran irigasi yang sistematis.
 - d. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - (1) Pembinaan, pendidikan politik dan bela negara;
 - (2) Koordinasi dan pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 - (1) Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
 - (2) Pengembangan kebijakan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - (3) Penguatan pembiayaan pembangunan desa.
- 5) **Misi 5** : Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan, dengan kebijakan :
- a. Bidang Lingkungan Hidup
 - (1) Meningkatkan upaya-upaya perlindungan, pengendalian pencemaran dan pemantauan kualitas air dan udara;
 - (2) Meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - (3) Meningkatkan upaya-upaya koordinasi dan penegakan hukum, pengawasan AMDAL, UKL/UPL, pelaksanaan penyusunan KLHS;
 - (4) Mengembangkan sistem informasi manajemen lingkungan hidup;

- (5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup;
- (6) Mengembangkan sistem regulasi, metode dan sarana prasarana pelayanan persampahan;
- (7) Mengembangkan penerapan pengelolaan sampah 3R berbasis masyarakat;
- (8) Peningkatan kapasitas SDM terutama PPNS bidang lingkungan hidup;
- (9) Penanganan lahan kritis dan pesisir pantai.

4.2. AGENDA PRIORITAS

Dalam rangka pencapaian pada masing-masing misi, maka difokuskan melalui beberapa agenda prioritas :

Agenda prioritas Misi Pertama, **Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Religius yang Harmonis**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Agenda Prioritas 1.1.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

No	Tematik	Fokus
1	Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Rintisan Wajar Dikdas 12 Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten sinergi dengan BOS Pusat dan Provinsi 2. Subsidi biaya operasional SMA 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru 4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 5. Peningkatan sarana belajar sesuai standarisasi yang ditetapkan (Laboratorium, perpustakaan, ruang guru, ruang penjaga, ruang TU, WC, lapangan olah raga, Prasarana lingkungan sekolah)
2	Pengembangan pendidikan kejuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis kebutuhan dunia usaha/ dunia industri 2. Peningkatan sarana dan prasarana

No	Tematik	Fokus
		SMK yang terstandar 3. Subsidi SMK
3	Peningkatan Mutu pendidikan dan kesejahteraan Guru	1. Pemberian beasiswa tugas belajar 2. Fasilitasi sertifikasi standar kompetensi guru 3. Peningkatan kemampuan guru bidang studi 4. Peningkatan mutu peserta didik

Tabel 2.3
Agenda Prioritas 1.2.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

No	Tematik	Fokus
1	Pengembangan sistem jaminan kesehatan (<i>Universal coverage</i>)	Penyediaan dana dan peningkatan sistem pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat
2	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	1. Penanggulangan gizi buruk 2. Pemberdayaan Posyandu 3. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan (terutama bidan desa)
3	Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan primer	1. Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap; dan puskesmas rawat inap mampu PONED secara bertahap sesuai standar yang berlaku 2. Optimalisasi kinerja pelayanan Poskesdes
4	Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular	1. Pelayanan vaksinasi dasar lengkap 2. Pencegahan dan penanggulangan KLB Penyakit 3. Pengembangan <i>system surveillance</i>
5	Peningkatan perilaku hidup	1. Peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan

No	Tematik	Fokus
	bersih dan sehat	2. Peningkatan kebersihan dan kesehatan lingkungan

Tabel 2.4
Agenda Prioritas 1.3.
Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Beragama yang Harmonis

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan kerukunan hidup antar dan inter umat beragama	1. Pengembangan komunikasi antar dan inter umat beragama 2. Pengembangan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
2	Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial keagamaan	1. Pembinaan kelembagaan sosial keagamaan 2. Peningkatan sarana dan prasarana keagamaan

Tabel 2.5
Agenda Prioritas 1.4.
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan	1. Optimalisasi kinerja tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 2. Penyusunan dan Evaluasi pelaksanaan RPJM Penanggulangan kemiskinan
2	Peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Penyediaan dan pemberdayaan panti rehabilitasi sosial 2. Advokasi, fasilitasi penanganan dan perlindungan anak dan perempuan 3. Penanganan masyarakat korban bencana

Agenda prioritas Misi Kedua **Penguatan Struktur dan Kelembagaan Ekonomi Daerah**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Agenda Prioritas 2.1.
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan Daerah

No	Tematik	Fokus
1	Revitalisasi sektor pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan komoditas unggulan sebagai rintisan <i>one vilage one product</i> Pengembangan varietas benih adaptif 2. Optimasi lahan dan sumberdaya air bagi pertanian 3. Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk Koperasi Tani yang <i>bankable</i> 4. Peningkatan kinerja penyuluhan pertanian 5. Pengembangan desain dan standar mutu beras karawang 6. Pengawasan peredaran pupuk dan pestisida 7. Fasilitasi teknologi dan mekanisasi pertanian
2	Pengembangan sentra produksi perikanan (mina bisnis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sentra produk-produk olahan hasil perikanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana TPI, TPHT 3. Penguatan kelembagaan kelompok nelayan dan pembudidaya dalam bentuk Koperasi nelayan dan pembudidaya yang <i>bankable</i> 4. Pengembangan desain dan standar mutu hasil perikanan
3	Pengembangan IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sentra IKM Unggulan menuju <i>one village one product</i> sektor industri.
4	Pengembangan pasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan pasar milik pemerintah 2. Fasilitasi pengembangan pasar desa 3. Terminal agribisnis (diutamakan Pasar Induk Beras) 4. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) berbasis tata ruang
5	Penguatan kapasitas usaha KUMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kebijakan, fasilitasi dan penyediaan skema pembiayaan KUMKM 2. Pembinaan kelembagaan dan

No	Tematik	Fokus
		kewirausahaan KUMKM
6	Penyediaan fasilitas, regulasi dan iklim usaha kepariwisataan daerah	1. Pemantapan manajemen perencanaan ODTW 2. Pembuatan RIPPDA
7	Pengembangan sarana dan prasarana obyek daya tarik wisata (ODTW)	1. Pembuatan dan peningkatan sarana dan prasarana kampung budaya dan wisata gerbang Karawang (3 tahun) 2. Peningkatan sarana dan prasarana ODTW bukit Sanggabuana (4 tahun)

Tabel 2.7
Agenda Prioritas 2.2
Penurunan Angka Pengangguran dan Perlindungan
Ketenagakerjaan

No	Tematik	Fokus
1	Perluasan Kesempatan Kerja	1. Peningkatan Kualitas SDM Tenaga Kerja 2. Penyediaan Sistem Informasi Bursa Tenaga Kerja 3. Pengembangan Regulasi Penempatan Tenaga Kerja
2	Perlindungan Ketenagakerjaan	1. Penerapan Sistem Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Tenaga Kerja 2. Pengembangan Regulasi dan Pengawasan Kebijakan UMK 3. Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) 4. Perlindungan TKI

Agenda prioritas Misi Ketiga **Meningkatkan Pelayanan Ketersediaan Infrastruktur Wilayah**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Agenda Prioritas 3.1
Pengembangan Sistem Transportasi Kabupaten

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan Jaringan Jalan	1. Mengembangkan ruas jalan Kolektor primer penghubung antar pusat

No	Tematik	Fokus
	dan Jembatan	<p>kegiatan (PKW - PKL, dan antar PKL) pada ruas jalan kabupaten</p> <p>2. Meningkatkan infrastruktur jalan penghubung pusat pengembangan wilayah (kolektor sekunder PKL/PPL dan antar PPL) pada ruas jalan Kabupaten</p> <p>3. Meningkatkan infrastruktur jalan pedesaan dengan diarahkan pada meningkatkan infrastruktur jalan poros desa penghubung PPK/PPL dengan desa</p> <p>4. Pembangunan Jembatan Penghubung Strategis</p> <p>5. Jalan antar kawasan</p>
2	Pengembangan Sistem Moda Transportasi	<p>1. Pengembangan Regulasi sistim transportasi Kabupaten</p> <p>2. Pembangunan Terminal</p> <p>3. Peningkatan sarana prasarana transportasi</p>

Tabel 2.9
Agenda Prioritas 3.2
Pengelolaan Sumberdaya Air

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan upaya upaya pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan	<p>1. Pengelolaan pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur Irigasi berbasis partisipasi masyarakat</p> <p>2. Perlindungan sumber daya air</p>
2	Pengembangan sistem prasarana pengendalian banjir	<p>1. Penyusunan <i>master plan</i> mitigasi bencana</p> <p>2. Penanganan abrasi pantai</p> <p>3. Koordinasi penanganan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS)</p>

Tabel 2.10
Agenda Prioritas 3.3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar Pemukiman dan Perumahan

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum	1. Pelayanan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
2	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan	1. Penataan Lingkungan Kumuh Permukiman (Penataan Kampung Layak Huni, meliputi Jalan Lingkungan, Drainase dan Sanitasi Lingkungan)

Tabel 2.11
Agenda Prioritas 3.4.
Penyediaan Prasarana Bangunan Pemerintahan dan Ruang Publik

No	Tematik	Fokus
1	Penyediaan bangunan Pemerintahan dan ruang publik	1. Penataan Gedung Kantor Pemerintah 2. Pembangunan <i>Public Space (prototype Karangpawitan)</i> di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 3. Penataan Taman Kota

Agenda prioritas Misi Keempat **Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Agenda Prioritas 4.1
Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Tematik	Fokus
1	Pengembangan sistem Administrasi pelayanan publik	1. Penataan sistem dan prosedur kerja pelayanan publik (PTSP, LPSE, <i>e-KTP</i>) 2. Peningkatan sarana dan prasarana kerja yang terstandar
2	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur	1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur (formal, teknis dan fungsional) 2. Penyusunan regulasi dan penerapan penilaian kinerja 3. Peningkatan tunjangan kesejahteraan pegawai
3	Peningkatan akuntabilitas,	1. Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan PAD

No	Tematik	Fokus
	efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah	2. Pengembangan sistem manajemen aset daerah 3. Pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah 4. Peningkatan sistem perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data 5. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal
4	Meningkatkan upaya-upaya terciptanya masyarakat tertib sosial dan tertib hukum	1. Pengembangan sistem regulasi dan penegakan peraturan daerah 2. Peningkatan kapasitas lembaga legislatif 3. fasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan 4. Meningkatkan pembinaan trantibmas, satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya

Tabel 2.13
 Agenda Prioritas 4.2
 Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Tematik	Fokus
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan	1. Pengembangan sistem dan penerapan regulasi, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa 2. Fasilitasi peningkatan kemampuan keuangan, perangkat, kelembagaan dan administrasi desa 3. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa

Agenda prioritas Misi Kelima **Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**, diarahkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Agenda Prioritas 5.1
Peningkatan Upaya Penanganan Bidang Lingkungan Hidup

No	Tematik	Fokus
1	Upaya perlindungan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana laboratorium pengujian lingkungan hidup 2. Peningkatan kapasitas SDM (diutamakan PPNS Bidang LH) 3. Penegakan peraturan bidang LH 4. Peningkatan upaya-upaya pengujian kualitas air dan udara
2	Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan ruang terbuka hijau 2. Pengembangan area mangrove di pesisir pantai (<i>green belt area</i> dan <i>silvo fishery</i>) 3. Penanganan lahan kritis (vegetasi DAS)

Tabel 2.15
Agenda Prioritas 5.2
Pelayanan Persampahan

No	Tematik	Fokus
1	Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyediaan sarana prasarana (TPSS, TPS) dan metoda pengolahan sampah di TPA menggunakan sistem <i>sanitary landfill</i>) 2. Pengembangan sistem pengolahan sampah 3R (<i>Recycle, Reduce, Reuse</i>) berbasis masyarakat

4.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karawang tahun 2013 tak lepas dari beberapa pendekatan baik itu pendekatan eksisting maupun pendekatan capaian kinerja dari sektor-sektor yang menjadi sasaran prioritas pada RPJMD 2011-2015. Prioritas pembangunan

daerah tahun 2013 juga tidak lepas dari isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Karawang.

Isu-isu strategis yang paling mendasar muncul pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat menyangkut penanggulangan kemiskinan. Di bidang pendidikan Sampai dengan tahun 2010, kondisi pendidikan di Kabupaten Karawang masih diwarnai dengan berbagai isu pokok antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana belajar yang terstandar juga persoalan mutu pendidik dan peserta didik.

Kondisi RLS, dipengaruhi juga oleh tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan yang diperlihatkan oleh Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK).

Kondisi kesiapan fisik ruang kelas dalam rangka penyediaan layanan pendidikan bagi siswa masih belum optimal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional mensyaratkan bahwa seorang guru SD/MI minimal memiliki pendidikan Diploma II (D2), D3 untuk SMP/ MTs dan S1 untuk SMA/SMK/ MA. Pelayanan pendidikan anak usia dini juga belum berkembang. Hal ini selain dikarenakan pemahaman masyarakat akan pentingnya PAUD masih minim, sarana dan prasarana serta lembaga pengelolaan PAUD masih kurang dan belum terpadu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum berkembang, namun secara pemanfaatan sudah mulai dilakukan rintisan-rintisan diberbagai sektor pemerintah daerah, terutama terkait dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan (kaji terap), penerapan teknologi informatika dan aplikasi teknologi pertanian. Khususnya untuk kegiatan penelitian telah banyak dilakukan dalam rangka perbaikan pelayanan publik, namun demikian secara aplikatif masih sangat sulit untuk diterapkan.

Di bidang kesehatan Angka harapan Hidup di Kabupaten Karawang pada tahun 2010 mencapai 66,85 dan angka kematian bayi sebesar 191 orang per 1000 kelahiran hidup. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/ penyakit dan berat bayi

lahir rendah, juga erat berkaitan dengan kondisi pada fase kehamilan. Sampai dengan tahun 2010, Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan ibu dan anak. Dari 136.946 balita sekitar 90,59 persen kelahirannya ditolong oleh bidan dan dokter, sedangkan sisanya sekitar hanya 9,41 persen ditolong oleh dukun bayi atau paraji. Dari data tersebut, sekitar 9,41 persen proses pertolongan persalinan masih dilakukan oleh dukun bayi. Artinya sejumlah persalinan tersebut memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena infeksi atau perawatan pasca persalinan yang kurang baik termasuk kondisi alat bantu yang seadanya dibandingkan apabila dilakukan oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan.

Air susu ibu (ASI) sangat penting artinya terhadap kesehatan balita. salah satu indikator yang bisa dilihat adalah lama menyusui. Dari seluruh balita di Karawang tahun 2010, sebanyak 136.946 balita atau 89,24 persen pernah diberi asi dengan lama menyusui rata-rata lebih dari 24 bulan. Dari angka tersebut Balita yang memperoleh layanan kesehatan (ditimbang) telah mencapai 176.075 atau sekitar 96 persen. Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan diperoleh temuan kasus Balita Gizi Buruk sebesar 3.237 jiwa atau sekitar 1,12 persen dari jumlah Balita yang ditimbang. kasus Balita Gizi Kurang dengan jumlah kasus terbesar terjadi pada tahun 2004 sebesar 17,81 persen. Dan pada tahun 2005 dapat diturunkan menjadi sekitar 13,27 persen atau sebesar 23.363 jiwa.

Cakupan pelayanan imunisasi rata-rata baru menjangkau 88-99%, yaitu BCG sebesar 99,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 71,32 persen, DPT sebesar 96,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,06 persen, Polio sebesar 93,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 57,28 persen, Campak sebesar 96,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 62,87 persen, Hepatitis B sebesar 88,00 persen dengan frekuensi terbanyak satu kali sebesar 46,84 persen.

Selain indikator mortalitas, indikator lain yang digunakan untuk menentukan derajat kesehatan penduduk adalah angka kesakitan (morbidity rate). Dilihat dari intensitas pola penyakit yang diderita oleh masyarakat antara lain Tuberkulosis (TB) paru, Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria, diare dan penyakit kulit. Selain itu,

Karawang juga menghadapi *emergency disease* seperti : Demam Berdarah Dengue (DBD), *Human immunodeficiency virus/ acquired immune deficiency syndrome* (HIV/AIDS).

Dibidang ekonomi kerakyatan masih terdapat isu rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya yang bergerak disektor informal (pertanian) dan industri (buruh pabrik) karena di dasarkan pada tingkat kepemilikan lahan pertanian dan tingkat pendidikan. Hal ini mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten karawang yang mencapai angka 13,06% begitu pula dengan tingkat pengangguran yang berada pada angka 10 %. Faktor tingginya angka-angka tersebut salah satunya tidak dimilikinya ketrampilan yang memadai dari masyarakat untuk menghadapi tantangan dunia industry yang berkembang di Kabupaten Karawang.

Dibidang infrastruktur, keterbatasan anggaran yang ada mengakibatkan masih terdapatnya ruas jalan yang rusak serta munculnya gejolak di masyarakat akan tuntutan infrastruktur jalan yang baik, seiring dengan berkembangnya karawang menjadi daerah industry.

Isu strategis yang lain adalah tantangan Kabupaten Karawang pada tahun 2013 dengan berkembangnya rencana pembangunan pelabuhan laut di Cilamaya dan Pembangunan bandara di Karawang Selatan, sehingga memunculkan pemikiran bagaimana masyarakat Karawang mampu menghadapi tantangan tersebut dengan tidak tergerus oleh kemajuan didaerahnya sendiri dari berbagai bidang baik social, ekonomi, budaya, sumber daya alam, pelestarian lingkungan hidup maupun pemanfaatan tata ruang .

Dari isu-isu strategis diatas, maka prioritas Program pembangunan daerah Kabupaten Karawang tahun 2013 difokuskan pada peningkatan Indeks Pembangunan Mansuia (IPM) melalui ;

1. Peningkatan kesejahteraan social melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta perwujudan kehidupan social yang religious dan harmonis;
2. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, perikanan, industry, perdagangan, koperasi, ketenagakerjaan dan pariwisata;

3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar infrastruktur dan pembangunan pedesaan;
4. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan tata ruang;
5. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab:

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PADA APBD-P TAHUN 2013

Berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Karawang tahun 2013 terjadi perubahan kebijakan yang kemudian diakomodir oleh Rencana Kerja Pembangunan Perubahan (RKPD-P) Tahun 2013. Perubahan kebijakan terutama dalam kebijakan belanja daerah tahun 2013 dilakukan secara selektif dan terbatas yang diarahkan pada:

1. Perubahan Kebijakan Belanja Tidak Langsung, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan alokasi belanja gaji pegawai berupa penyesuaian alokasi tunjangan profesi guru berdasarkan PMK Nomor 41/PMK.07/2013 Tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2013.
 - b. Perubahan besaran alokasi belanja hibah dan bantuan sosial yang disebabkan adanya pendampingan dana PNPM Perkotaan, pekerjaan sanitasi lingkungan (MCK) yang bersumber dari dana DAK serta pemberian santunan kepada anak yatim di dalam panti asuhan.
 - c. Penambahan alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa untuk pembangunan gedung kantor desa sebanyak 30 unit.
2. Perubahan Kebijakan Belanja Langsung, antara lain meliputi:
 - a. Penambahan kegiatan baru berikut alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN yang peruntukannya sudah diarahkan maupun Usulan kegiatan yang bersifat baru pada SKPD dengan memperhitungkan skala prioritas, tingkat urgensi dan waktu penyelesaian kegiatan.
 - b. Penambahan alokasi belanja SKPD dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun anggaran 2013. Penambahan alokasi anggaran dimaksud antara lain :

- 1) Dinas Bina Marga dan Pengairan diarahkan untuk Pembangunan saluran drainase, Pembangunan turap, Pemeliharaan jalan dan jembatan, Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan jembatan, jalan dan saluran pembuang, Pemeliharaan jaringan irigasi, Pembangunan infrastruktur pedesaan.
 - 2) Dinas Ciptakarya diarahkan untuk Prasarana Permukiman Desa/ Kota (Jalan Setapak, jalan Lingkungan dan drainase Lingkungan Dan PLPDN, Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang.
 - 3) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Pendidikan berupa insentif kepada 8.316 orang dan uang Transport kepada 13.146 orang, Pembangunan Ruang Kelas baru SMP dan SMA/SMK, Penyelenggaraan SMP Terbuka, Kegiatan Pemuda dan Olahraga, Pengembangan PAUD.
 - 4) Dinas Kesehatan diarahkan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu, penanggulangan penyakit menular, dan upaya promosi kesehatan lainnya.
 - 5) Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi diarahkan untuk Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja.
 - 6) Dinas Kebudayaan dan Parawisata diarahkan untuk Pembangunan ODTW Kampung Budaya Gerbang Karawang.
 - 7) Dinas Perikanan dan Kelutan diarahkan untuk peningkatan produksi dan pemasaran hasil Perikanan.
 - 8) Badan Pemberdayaan dan Masyarakat Desa diarahkan untuk Penyelenggaraan Pilkasdes di 12 desa, Penunjang kegiatan Gerai PNPM dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan desa.
- c. Pergeseran antar kegiatan, obyek dan/ atau rincian obyek belanja masing-masing SKPD dengan memperhatikan pada efektifitas dan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Pergeseran kegiatan antar SKPD secara signifikan berupa pergeseran kegiatan pengadaan tanah yang sebelumnya dianggarkan pada Bagian Pertanahan Setda kepada SKPD – SKPD pengusul (Disdikpora, Dinkes, Dinas Binamarga dan Pengairan, Dinas

Cipta Karya, Dishubkominfo, Disbudpar, BP4K, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Disperindag Tamben).

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA